

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena eksistensi organisasi massa atau yang sering disebut Ormas di Bali. Perkembangan Ormas di Bali merupakan salah satu dampak dari pertumbuhan industri pariwisata Bali yang sangat cepat dan dinamis. Banyaknya fasilitas pariwisata seperti hotel, restaurant hingga tempat hiburan yang membutuhkan jasa “keamanan” sipil memacu berkembangnya ormas. Dikutip dari Bali Post, hingga Februari 2020 sebanyak 313 Ormas yang telah terdaftar di Kesbangpolinmas Kota Denpasar. (Putera, 2020)

Dalam buku *“The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority and Street Politics”* atau yang diterjemahkan sebagai “Politik Jatah Preman” (Wilson, 2015) menyatakan salah satu sebab munculnya kelompok-kelompok ini adalah gagalnya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan sosial pada rakyat sehingga masyarakat membentuk kelompok-kelompok sipil yang berusaha bermain dalam lingkup politik dan ekonomi, dimana perebutan wilayah kekuasaan pada tataran lokal menjadi isu penting bagi organisasi masyarakat ini. Menjamurnya keberadaan ormas di Bali mulai meresahkan masyarakat semenjak terdapat ekposure dari organisasi ini melalui beberapa publikasi yang dilakukan seperti penggunaan baliho di ruas jalan raya, di hampir setiap perempatan jalan kota dan kabupaten di Bali. Baliho tersebut menampilkan sosok “*strongmen*” di balik ormas, dengan foto pimpinan ormas yang berpenampilan layaknya preman; berbadan tegap, tattoo di kedua tangan, serta

seringkali menggunakan kacamata hitam. Penggunaan simbol-simbol lain pada baliho seperti logo organisasi yang menggunakan senjata para Dewa di Bali melengapi kesan kekerasan dan premanisme yang dapat ditangkap melalui baliho tersebut.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Laboratorium Ilmu Politik Universitas Udayana tahun 2016 di 9 kabupaten/kota di Bali, persepsi masyarakat Bali terhadap tiga ormas besar di Bali (Laskar Bali, Baladika dan Pemuda Bali Bersatu) menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat di Bali memiliki persepsi yang negatif terhadap ketiga ormas tersebut. 70% masyarakat bahkan merasa terganggu dengan baliho yang terpasang di wilayah mereka. (Apriani, 2021)

Persepsi negatif masyarakat terhadap ormas diperkuat oleh sejumlah peristiwa perkelahian antar ormas yang mengakibatkan kematian dari salah satu pihak, dan menjadi pemicu terjadi pembunuhan misterius lainnya yang diduga sebagai aksi balas-membalas dendam dua ormas yang berseteru. Akibatnya, seperti yang diberitakan baliberkarya.com, Kapolda Bali mengambil tindakan dengan membekukan tiga ormas besar di Bali yaitu Laskar Bali, Baladika Bali dan Pemuda Bali Bersatu. Ketiga ormas tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana, mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Bahkan ormas Laskar Bali dinyatakan sebagai salah satu dari tiga kelompok *Asia's most notorious gangs* oleh Amy Chavez dalam artikelnya pada sebuah majalah di Jepang (Chavez, 2015). Michael Bachelard, editor majalah *The Age* dan *The Sydney Morning Herald*, surat kabar yang terbit di Australia menyebutkan ormas-ormas ini sebagai “*violent gangs*” pada artikelnya yang berjudul *The Dark Side Of The Sun* (Bachelard, 2014).

Kemunculan ormas di Bali dilihat dari sejarahnya bukan hal yang baru. Di Indonesia, Ormas telah hadir dalam perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut sampai saat ini masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kegiatan di tengah-tengah masyarakat pada berbagai kegiatan sosial masyarakat misalnya organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Budi Oetomo, Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Indonesia Muda, dll. (Winayanti, 2011)

Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis kemasyarakatan yang tidak bertujuan politis. Di Bali pun, Ormas memiliki sejarah yang cukup panjang dimana salah satu penyebab awal berkembangnya ormas yang ada saat ini adalah sebagai bentuk jawaban dari kesulitan ekonomi pasca bom Bali. Tragedi bom Bali mengakibatkan sebagian besar masyarakat Bali kehilangan pekerjaan. Seiring dengan pemulihan industri pariwisata pasca bom bali, kemudian organisasi ini muncul sebagai wadah peluang dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Fasilitas pariwisata mulai dibangun lagi dan membutuhkan jaminan keamanan pada fasilitas pariwisata seperti hotel, restaurant hingga klub malam yang tidak bisa diberikan oleh aparat kepolisian. Perusahaan penyedia layanan keamanan terbentuk dengan melibatkan ormas-ormas yang ada.

Saat ini keberadaan ormas bertambah banyak, dengan jumlah anggota yang juga bertambah. Ormas Pemuda Bali Bersatu, salah satu Ormas yang dinyatakan

sebagai organisasi yang berbahaya (*organized crime organization*) oleh Kapolda Bali memiliki jumlah anggota sekitar 20 ribu dan terus bertambah setiap tahunnya. Menurut hasil wawancara dengan pimpinan Ormas Pemuda Bali Bersatu atau biasa disingkat PBB, anggota ormas ini tidak hanya berasal dari Bali saja, namun juga ada anggota dari luar Bali yang beragama non-hindu. Dengan perbedaan latar belakang budaya yang dimiliki, anggota-anggota ormas ini tetap memiliki ikatan yang kuat bahkan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kelompoknya. Penggunaan tattoo sebagai identitas atau penanda keanggotaan merupakan salah satu bukti loyalitas mereka terhadap kelompok.

Berdasarkan data Polda Bali, pada 2015 tercatat 11 kali kejadian, pada 2016 tercatat 12 kali kejadian dan 2017 ada tiga kali kejadian yang meresahkan masyarakat. Perbuatan oknum Ormas tersebut dari analisis fakta dan analisis yuridis Polda Bali telah melanggar UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, bahkan oknum ormas itu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur KUHP. Berdasarkan hal tersebut, Polda Bali merekomendasikan agar Ormas yang melakukan tindak pidana dan menyatakan Ormas sebagai "*organized crime*" yang telah meresahkan agar dilakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum, penghentian sementara kegiatan dan pembubaran ormas (Negara, 2019). Menjawab surat rekomendasi Kapolda Bali itu, akhirnya pada 15 Januari 2019 Gubernur Bali Wayan Koster memberikan peringatan kepada tiga Ormas terbesar di Bali yaitu DPP Laskar Bali, DPD Keluarga Suka Duka Baladika Bali dan Pemuda Bali Bersatu agar tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan merugikan masyarakat.

Istilah “*Organized Crime*” yang digunakan oleh Kapolda Bali merupakan istilah yang banyak mengacu pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi tertentu yang sudah mapan, bahkan terkadang diterjemahkan pula sebagai suatu organisasi yang keberadaannya didasarkan pada kegiatan-kegiatan kriminal. Maltz, (1976) pada “*Defining Organized Crime* “ dalam jurnal *Crime and Delinquency* lebih menitikberatkan pada adanya hubungan-hubungan dan organisasi yang terjadi di dalam kejahatan itu sendiri. Sementara Frank Hagan, mendefinisikan *organized crime* sebagai kelompok individu mana pun yang kegiatan utamanya melibatkan pelanggaran undang-undang, penjahat untuk mencari keuntungan dan kekuasaan ilegal dengan terlibat dalam kegiatan pemerasan dan, jika perlu, terlibat dalam manipulasi keuangan yang rumit.

Organized Crime merupakan fenomena yang telah lama muncul di dunia. Albini (1971) dalam bukunya “*The American Mafia: The Genesis of a Legend, 1971*, menunjukkan betapa licinnya kelompok yang disebut sebagai mafia atau nama apapun yang dipakainya untuk menunjukkan adanya “*the enemy within*” atau “*the alien conspiracy*”. Cerita tentang kaum Triad di Cina, cartel-cartel di Kolombia, Yakuza di Jepang dan Cosa Nostra di Amerika Serikat telah cukup banyak menghiasi berbagai media massa yang mendunia. Jelas bahwa semua seakan menampilkan adanya suatu kelompok besar dengan kekuasaan, kekayaan, sumber daya dan upaya-upaya kolusif yang begitu besarnya dalam mengelola kejahatan, sehingga mampu bertahan berpuluh tahun lamanya di dunia gelap ini.

Harkrisnowo & Harkristuti (2014) dalam jurnalnya yang berjudul *Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan*

Kriminologi, *Indonesian Journal of International Law* (2004) menyatakan informasi yang sedemikian banyaknya mengenai *organized crime* ini menimbulkan pula kecemasan akan merebaknya *organized crime* di Indonesia. Hal ini makin dipicu oleh ditemukannya sejumlah *drug trafficker* dari berbagai Negara yang melakukan operasinya di Indonesia, perdagangan uang yang diduga dilakukan sejumlah orang Indonesia dan dari manca negara, perdagangan senjata api, *human trafficking*, serta berbagai penipuan berkedok bisnis yang mengakibatkan sejumlah korban dengan kerugian yang fenomenal.

Meskipun telah dinyatakan sebagai *organized crime organization*, namun kenyataannya masih banyak masyarakat Bali khususnya anak muda yang bergabung ke dalam organisasi tersebut. Tercatat dari jumlah Kartu Anggota (KTA) yang dikeluarkan salah satu Ormas tersebut, anggota mereka per 2018 mencapai 20 ribuan orang. Melihat banyaknya anggota yang terdaftar, justru menambah loyalitas dan kohesivitas kelompok, salah satu cerminannya adalah banyaknya pemuda Bali yang menggunakan atribut organisasi ini, dari baju kaos, sticker mobil hingga tattoo logo ormas tersebut. Loyalitas para anggota pun tercermin dari sikap fanatisme dari para anggotanya. Sikap fanatisme dan loyal ini ditunjukkan tidak hanya kepada organisasi namun juga kepada para pimpinan Ormas, yang bahkan belum pernah bertemu secara langsung. Ormas ini seolah membentuk “komunitas terbayang”, sebuah konsep dari Benedict Anderson (2008) dimana ormas menjadi suatu komunitas dimana mustahil para individu anggotanya untuk benar-benar pernah berinteraksi namun memiliki ikatan yang kuat.

Campbell (2017) dalam bukunya *Serious Organised Crime in Scotland: The Role of Communications in Reducing Demand, Victimisation and Fear*, menyatakan bahwa terdapat banyak ancaman dimana publik antara tidak percaya mereka terhubung dengan *organized crime organization* atau tidak menyadarinya sama sekali. Ketidaksadaran ini penting untuk beberapa alasan. Pertama, mayoritas orang tidak menganggap dirinya terpengaruh oleh atau berisiko terkena kejahatan terorganisir, menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang terjadi di tempat lain dan pada orang lain. Oleh karena itu kecil kemungkinan bagi mereka untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari kejahatan terorganisir (*organize crime*).

Secara umum, mereka yang tidak memiliki pengalaman pribadi tentang kejahatan atau yang tidak mempercayainya memiliki pengalaman pribadi tentang kejahatan, lebih cenderung mengandalkan penggambaran dalam berita atau media hiburan, yang pada gilirannya lebih cenderung berfokus pada kekerasan atau kejahatan interpersonal lainnya. Kedua, kejahatan terorganisir sebagian besar didanai oleh masyarakat umum, baik melalui pembelian obat-obatan yang diawasi atau barang terlarang lainnya, atau melalui viktimisasi yang tidak diinginkan. Tanpa sumber dana ini, kemampuan kejahatan terorganisir untuk menimbulkan fisik atau kerugian ekonomi. Ketiga, 'kejahatan terorganisir' sebagai sebuah konsep yang sudah menuai kecaman luas, dan kebanyakan orang menyatakan bahwa mereka akan melaporkannya jika mereka melihatnya. Namun, sebanyak apapun itu kejahatan terorganisir tidak akan dikenali karena itikad baik publik tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi laporan untuk penegakan hukum.

Kesadaran masyarakat Bali terhadap organisasi berbahaya ini dikaburkan dengan banyaknya aktivitas sosial yang diselenggarakan oleh ormas ini. Ormas ini berhasil membangun identitas mereka sebagai penjaga budaya Bali. Selain itu, ormas ini juga memberikan kesempatan untuk memiliki pekerjaan kepada masyarakat yang tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadikan banyak pemuda Bali bergabung bersama ormas ini, dan akhirnya terlibat dalam perkelahian antar ormas.

Kenyataan ini mendorong peneliti untuk memahami organisasi ini melalui pendekatan komunikasi. Komunikasi antar anggota ormas yang tidak hanya berasal dari satu etnik ini, tentunya memiliki pengkhasan bahasa tutur yang digunakan pimpinan Ormas dengan nilai-nilai, keyakinan, norma, emosi, pemikiran, motivasi, cara pandang dan bahasa yang digunakan. Demikian pula anggota ormas memiliki pengkhasan bahasa tutur dalam berinteraksi dalam kesehariannya maupun yang bertujuan untuk penguatan identitas kelompok. Henry Tajfel dan John Turner dalam West & Turner (2010) menyadari pentingnya diri dan hubungannya dengan identitas kelompok dimana identitas sosial seseorang ditentukan oleh kelompok dimana ia tergabung. Orang yang termotivasi untuk bergabung dengan kelompok yang paling menarik dan atau memberikan keuntungan bagi kelompok dimana ia tergabung di dalamnya.

Lebih lanjut, Turner dan Tajfel mengamati bahwa orang berjuang untuk mendapatkan atau mempertahankan identitas sosial yang positif dan ketika identitas sosial dipandang tidak memuaskan, mereka akan bergabung dengan kelompok dimana mereka merasa lebih nyaman atau membuat kelompok dimana mereka

sedang tergabung sebagai tempat yang lebih menyenangkan. Hogg & Abrams (1998) juga menambahkan bahwa rasa keterikatan, peduli serta bangga yang berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan social dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat, mengetahui atau memiliki berbagai minat. Kebersamaan dan kerjasama merupakan satu dinamika yang menjadi landasan terbentuknya kelompok dengan segala macam dinamika yang bertumbuh bersamanya. Kesadaran seseorang akan identitas sosialnya menentukan cara dan pola pikir dan perilakunya.

Saat berinteraksi, manusia tidak hanya menggunakan bahasa verbal dan nonverbal, namun juga menggunakan yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dalam perspektif Interaksi Simbolik, perilaku manusia dilihat sebagai proses yang memungkinkan untuk membentuk dan mengatur perilaku manusia dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain dalam interaksi mereka. Oleh karenanya, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial.

Situasi-situasi yang terbentuk dalam interaksi anggota organisasi menentukan status dan kedudukan para anggota atau pelaku komunikasi. Setiap pelaku komunikasi dapat memodifikasi peran yang diambalnya melalui bahasa ujaran dan selama kontak antar-pribadi berlangsung. Siapa yang mulai berbicara, siapa yang berbicara, dengan siapa ia bicara, topik apa yang dibicarakan, dimana dibicarakan atau di mana peristiwa tutur itu terjadi.

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat sembarang (arbitrer), dipakai oleh anggota-anggota masyarakat untuk berhubungan dan berinteraksi. Bahasa memiliki lambang tersendiri dan merupakan hasil kesepakatan bersama dari sebuah masyarakat, dimana kesepakatan pada satu kelompok belum tentu sama dengan masyarakat lainnya. Bahasa bersifat arbitrer, dapat diciptakan semaunya menurut penciptanya dan kesepakatan kelompok sehingga memungkinkan bahasa menjadi beragam dan bersifat unik. Dilihat dari situasi kelompok masyarakat yang majemuk dan cenderung terbuka, maka bahasa memiliki kelompok penggunaannya sendiri, atau dikenal dengan istilah *speech community*.

Istilah *speech community* diperkenalkan oleh Dell Hymes yang merujuk pada sekelompok, komunitas, atau organisasi masyarakat yang memiliki aturan dan pola berbicara tertentu (Johnstone & Marcellino, 2010). Dalam konteks organisasi, *speech community* merupakan konsekuensi dari budaya organisasi yang dibangun di dalamnya seperti yang juga dinyatakan oleh Robbins (1996) yang mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lainnya. Perbedaan tersebut antara lain asumsi dasar, perilaku atau bagaimana cara berkomunikasi, khususnya penggunaan lambang dan simbol tertentu.

Dalam penggunaan bahasa atau lambang komunikasi, paling tidak ada empat pola yang terjadi dalam gejala *speech community*. Pertama, para anggota organisasi akan menciptakan makna yang digunakan bersama dengan menggunakan kode-kode yang memiliki derajat pemahaman yang sama yang

disebut sebagai aktivitas komunikasi. Kedua, para komunikator dalam sebuah komunitas tertentu terdapat aturan atau norma yang disesuaikan dengan setting dan tujuan komunikasi itu sendiri. Ketiga, makna dan tindakan bersifat spesifik dalam sebuah komunitas, sehingga antara komunitas yang satu dan lainnya akan memiliki perbedaan dalam hal makna dan tindakan tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh kompetensi komunikasi yang mencakup linguistik, keterampilan interaksi dan pengetahuan kebudayaan yang merupakan bagian dari objek kajian etnografi komunikasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini, digunakan etnografi komunikasi yang mengkaji peranan bahasa dalam perilaku komunikatif masyarakat, cara bagaimana bahasa digunakan dalam kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan.

Hymes memaparkan bahwa etnografi komunikasi merupakan ilmu sekaligus metode penelitian yang berfokus pada situasi, penggunaan, pola dan fungsi berbahasa sebagai sebuah aktivitas tersendiri seperti juga yang dinyatakan oleh Kuswarno (2019) bahwa etnografi komunikasi adalah pengkajian peranan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya.

Sementara Saville-Troike (2003) menyatakan bahwa etnografi komunikasi memiliki dua fokus: partikularistik dan generalisasi. Di satu sisi, ini diarahkan pada deskripsi dan pemahaman perilaku komunikatif dalam latar budaya tertentu tetapi juga diarahkan ke perumusan konsep dan teori yang di atasnya membangun metateori global komunikasi manusia. Dengan memahami pola-pola komunikasi yang hidup dalam masyarakat tutur (*speech community*) atau masyarakat yang

memiliki kaidah yang sama untuk berkomunikasi, akan memberikan gambaran umum (regularitas) dari perilaku komunikasi masyarakat tersebut. Dari pola ini juga dapat diketahui bagaimana unit-unit komunikatif dari suatu masyarakat tutur diorganisasikan, dipandang luas sebagai “cara-cara berbicara” dan bersama dengan makna menurunkan makna dari aspek-aspek kebudayaan lain.

Dengan menggunakan metode Etnografi Komunikasi, penelitian ini mencoba mengungkap peristiwa komunikasi yang terjadi berulang antar anggota Ormas Pemuda Bali Bersatu, menggambarkan hubungan antar komponen komunikasi yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Selain itu penelitian ini juga akan mengamati simbol-simbol yang digunakan hingga nilai-nilai yang ditanamkan kepada anggota kelompoknya sehingga peneliti dapat menemukan pola komunikasi pada anggota Ormas tersebut. Dengan mengetahui pola komunikasi dari Ormas tersebut, diharapkan dapat mengatasi fenomena berkembangnya Ormas-oramas sejenis yang ada di Bali, serta mereduksi dampak negatif dari eksistensi Ormas tersebut.

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan peristiwa komunikasi yang terjadi secara berulang (*recurrence events*) pada ormas tersebut
2. Untuk menggambarkan komponen-komponen komunikasi yang ada dalam peristiwa komunikasi pada ormas tersebut

3. Untuk menggambarkan simbol-simbol verbal dan non verbal serta nilai-nilai yang ditanamkan oleh organisasi kepada anggota kelompoknya
4. Untuk mengkonstruksi pola komunikasi kelompok pada anggota ormas tersebut

1.3. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian komunikasi, terutama tentang pola komunikasi dan budaya organisasi melalui studi etnografi komunikasi. Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengamati perilaku komunikasi organisasi mengingat kajian dalam bidang ini belum banyak dilakukan, sementara eksistensi dan fenomena organisasi-organisasi masyarakat terus meningkat dan beragam, dimana kelompok-kelompok tersebut dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas bangsa dan negara jika pemerintah dan masyarakat tidak mengawasi perkembangannya dengan teliti.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada institusi pemerintah yang bertugas dalam mengawasi eksistensi dan aktivitas Organisasi Masyarakat di Indonesia. Dengan mengetahui pola komunikasi Organisasi Masyarakat, pemerintah dapat mengantisipasi aktivitas, dan mereduksi dampak negatif dari eksistensi Organisasi masyarakat di Indonesia, serta dapat meningkatkan pemberdayaan Organisasi ini dalam menjaga keamanan dan stabilitas Negara.

Penelitian ini juga memiliki kegunaan untuk masyarakat Bali yaitu menambah referensi dan pengetahuan mengenai organisasi ini. Pengetahuan dan

awareness atau kesadaran masyarakat Bali terhadap ormas ini hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh ormas tersebut, sedangkan kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan tidak terekspose sehingga masyarakat tidak menyadari bahaya dari eksistensi ormas ini. Selain itu, semakin banyak pemuda Bali yang mengikuti gaya hidup anggota ormas ini dimana mereka mulai menormalisasi penggunaan tato, perkelahian antar sesama pemuda hingga aktivitas *tajen* atau judi sabung ayam yang biasa diselenggarakan oleh ormas ini. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ormas ini sehingga menjadi *early warning* mengenai dampak dari keberadaan dan keterlibatan masyarakat khususnya para pemuda dengan ormas ini.

1.4. Kajian Literatur

1.4.1 Review Penelitian Sejenis

Kajian mengenai *organized crime organization*, banyak dilakukan di berbagai Negara di dunia. Namun istilah *organized crime* sendiri masih bervariasi dan ambigu. Schubert (2015) dalam artikelnya yang berjudul *The Challenge of Community-Based Armed Groups: Towards a Conceptualization of Militias, Gangs, and Vigilantes, Contemporary Security Policy*, mencermati tipologi yang mengklasifikasikan milisi, geng, dan warga sipil berdasarkan dimensi politik, ekonomi, dan keamanan mereka. Jenis ideal yang dihasilkan dibahas melalui lensa kerangka penjelasan yang berbeda dan perdebatan kebijakan di bidang studi keamanan kontemporer. Masalah tipologis utama adalah kecenderungan bagi kelompok bersenjata berbasis masyarakat untuk “berubah menjadi buruk” dan

menjadi ancaman terhadap stabilitas yang diharapkan akan di ubah menjadi masalah serius di negara tempat mereka beroperasi. Disimpulkan bahwa tantangan kelompok bersenjata berbasis masyarakat pada akhirnya perlu diatasi dengan menempatkan negara yang berfungsi yang dapat mengatasi kesengsaraan yang mendasari yang menyebabkan proliferasi mereka di tempat pertama.

Terdapat pula kajian lain mengenai mengenai keterlibatan aktor bersenjata non-negara (*Non-State Armed Actor*) yang berjuang untuk mengamankan dominasi ekonomi, dan yang kegiatannya mengungkap jaringan alternatif kekuasaan, otoritas, kemandirian, dan pemerintahan sendiri yang terungkap pada berbagai skala teritorial baik lebih kecil dan lebih besar dari negara-bangsa. Dengan fokus pada aktor polisi swasta, geng, dan mafia, Davis (2009) dalam artikelnya yang berjudul “*Non-State Armed Actors, New Imagined Communities, and Shifting Patterns of Sovereignty and Insecurity in the Modern World, Contemporary Security Policy*” memetakan proliferasi dan signifikansi aksi bersenjata non-negara yang terstruktur di sekitar kegiatan ekonomi, dan menilai sifat kekerasan dan ketidakamanan yang dihasilkan oleh kegiatan ini sebagai perbandingan untuk tindakan non-negara yang lebih berorientasi politik konvensional.

Keterlibatan *organized crime organization* dalam proses demokratisasi di kawasan Asia Tengah dikaji oleh Ceccarelli (2007). Artikelnya mencoba menyelidiki koneksi antara *Clan* (Keluarga Terkemuka), Elit Politik dan *organized crime* serta mengeksplorasi bagaimana jaringan kriminal berkembang biak di masyarakat serta konsekuensinya dalam dunia politik. Setelah jatuhnya bekas Uni Soviet, bentuk kejahatan (*transnational organized crime*) tumbuh subur dimana

menurut statistic resmi UNODC dan The American State Department, 92% heroin dunia diproduksi di Afganistan, 65% nya diselundupkan ke Eropa dan Amerika di sepanjang jalur sutra, melalui lima Negara Asia Tengah dan Rusia. Ekonomi wilayah tersebut semakin di dominasi oleh aktivitas kriminal seperti penyelundupan, perdagangan manusia dan aktivitas lain yang terkait dengan *transnational organized crime* sebagai sumber pendapatan utama. Dalam artikel ini disebutkan bahwa negara-negara barat mencoba menggiring jatuhnya Uni Soviet sebagai kebangkitan Republik Independen pasca Soviet ke dalam konteks yang lebih luas sebagai gelombang ketiga demokratisasi sementara masyarakat dari Asia Tengah sangat tidak siap dengan perkembangan tersebut. Krisis ekonomi endemik setelah pembubaran Uni Soviet menyebabkan Asia Tengah menghadapi melonjaknya pengangguran dan masalah sosial lainnya.

Minimnya sumber yang bisa dieksploitasi atau adanya keuntungan yang dimiliki oleh pihak elit tertentu menyebabkan ketidakpuasan masyarakat meningkat seiring dengan bertambahnya kelompok Islam terlarang yang kuat. Beberapa diantaranya memiliki sumber pendanaan utama dari perdagangan narkoba yang diselundupkan melalui Asia Tengah. Sejumlah besar narkoba yang diselundupkan melalui Asia Tengah dan hubungan yang mengkhawatirkan antara lembaga-lembaga Negara dan kejahatan terorganisir menyebabkan banyak kekhawatiran mengenai kriminalisasi di negara-negara ini dan kemungkinan nyata dari munculnya negara-negara narkotika. Meskipun menurut para pengamat dari Barat, memerangi kejahatan terorganisir dibutuhkan, namun belum tentu sama untuk

pemerintah Asia Tengah. Kemungkinan munculnya negara-negara narkoba adalah masalah stabilitas dan keamanan kawasan.

Pemberantasan kejahatan terorganisir yang merajalela, korupsi dan merebaknya berbagai bentuk perdagangan manusia mutlak diperlukan untuk menghindari terbentuknya negara mafia. Meskipun kebutuhan untuk memerangi kejahatan terorganisir jelas bagi kalangan barat, hal itu belum tentu sama untuk pemerintah Asia Tengah. Meningkatnya jumlah demonstrasi yang meminta diberlakukannya undang-undang antikorupsi dan pernyataan pemerintah, namun para presiden dan kaum elit tidak terlalu tertarik untuk menginterupsi *Crime-State Nexus*. Kontrol tangan besi para presiden atas negara mereka tidak menyisakan banyak ruang untuk diskusi dalam masalah ini. Dalam situasi seperti ini, berbicara tentang demokratisasi, sejauh dianggap oleh dunia Barat, tentu terlalu dini dan tidak pada tempatnya. Ada kemungkinan bahwa proses demokratisasi "Barat" bukanlah yang dibutuhkan negara-negara ini, melainkan intervensi serius dan terarah dari pihak donor barat, belum lagi adopsi posisi politik yang jelas oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini menjadi lebih parah mengingat China, Rusia, India, Pakistan (dan sekarang bahkan Iran) sudah sangat terikat dengan Republik Asia Tengah melalui Organisasi Kerjasama Shanghai.

Proses keterlibatan anggota *organized crime* dan jalur menuju keterlibatannya diteliti oleh Kemp et al., (2020) dalam atikelnya yang berjudul *Pathways into Organized Crime: comparing founders and joiners* yang menggunakan analisis konten untuk keterlibatan serta analisis kuantitatif untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan dalam proses keterlibatan antara

pelaku yang bergabung (*joiners*) atau pendiri (*founders*) *organized crime*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tindakan yang berkaitan dengan faktor resiko, lintasan kriminal, titik balik, motivasi kriminal dan pengaruh sosial, dalam keterlibatan berbeda secara statistik antara satu kelompok dengan yang lainnya. Disimpulkan bahwa “pendiri” dipengaruhi oleh peluang kriminal jangka pendek dan pertimbangan ekonomi terhadap keterlibatan *organize crime*, sedangkan “*joiners*” lebih dipengaruhi oleh dinamika sosial jangka panjang yang timbul dari ikatan dan paparan *organized crime*, seperti keterlibatan orang tua atau pendahulunya di *organized crime*. Temuan ini dapat berperan dalam membangun teori keterlibatan *organized crime*, dimana disimpulkan bahwa “*joiners*” menjadi terlibat akibat adanya “proses penularan”.

Terdapat kajian mengenai penyebab dari *organized crime* yang menguji asumsi bahwa individu atau organisasi yang rentan terhadap kejahatan bergerak untuk mengeksploitasi perubahan peluang kriminal. Dalam artikel yang berjudul “*The Causes of Organized Crime: Do Criminals Organize Around Opportunities for Crime or Do Criminal Opportunities Create New Offenders?*” Albanese (2000) mengembangkan model prediksi yang menentukan hubungan antara peluang kriminal, lingkungan kriminal (pelaku), dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas kejahatan terorganisir (*organized crime*). Upaya telah dilakukan untuk menilai model ini melalui penerapan lima studi kasus terkini tentang kejahatan terorganisir di wilayah geografis yang berbeda dan berfokus pada kejahatan yang berbeda.

Hipotesis dari model yang diusulkan adalah terdapat tiga elemen utama yang penting dalam memprediksi terjadinya *organized crime* yaitu faktor kesempatan, lingkungan kejahatan dan keahlian atau akses yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas kejahatan. Disimpulkan bahwa model tersebut harus diterapkan pada setiap jenis kejahatan tertentu di setiap wilayah geografis tertentu agar lebih efektif. Ini karena peluang, pelanggar (anggota *organized crime*), dan keterampilan yang dibutuhkan kemungkinan besar akan bervariasi untuk setiap jenis pelanggaran dan di setiap yuridiksi. Kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, kemampuan penegakan hukum, permintaan untuk produk dan layanan, peluang baru untuk kejahatan, dan keterampilan yang tersedia dan pelanggar yang termotivasi akan berbeda untuk setiap pelanggaran dan antar yurisdiksi.

Di Indonesia, kajian mengenai *organized crime* belum banyak dilakukan. Terdapat kajian mengenai *organized crime* dilakukan oleh Harkrisnowo & Harkristuti (2014) yang membahas mengenai karakterisasi *organized crime*, jenis kejahatan yang dilakukan dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi *transnational organized crime*. Dalam tulisannya yang berjudul “*Transnational Organized Crime dalam perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*” yang dimuat dalam *Indonesian Journal Of International Law*, disebutkan bahwa *organized crime* memiliki organisasi yang mungkin lebih teratur daripada organisasi pemerintahan. Model organisasi yang digunakan oleh organisasi tersebut dikenal dengan *patrimonial* atau *patron-client network* yang berasal dari tradisi Italia yang disandarkan pada hubungan kekeluargaan dan semua anggota rata-rata berdarah Italia. Kajian ini juga mengungkapkan upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas *organized* dan

transnational organized crime serta pembentukan sejumlah lembaga seperti Badan Narkotika Nasional, PPATK termasuk unit-unit di Kepolisian yang khusus menangani kejahatan dalam kategori *transnational organized crime*.

Sementara kajian mengenai Organisasi Masyarakat yang banyak ditemukan di Indonesia berkaitan dengan Ormas yang berafiliasi dengan agama, politik, dan keberadaannya yang masih menjadi kontroversi. Seperti penelitian mengenai Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia, yang dilakukan oleh Herdiansah (2016). Jurnal ini menguraikan tinjauan kritis peran Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. Dijelaskan pula bahwa Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemapanan dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan social, sebab mereka diharapkan mampu menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial.

Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia yang masih rendah, telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Lebih jauh, artikel ini memaparkan pentingnya

peran Ormas/LSM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ormas/LSM tidak hanya menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan Negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial politik, Ormas dan LSM yang ada di Indonesia turut andil dalam menjadi *stabilizer* ketertiban dan keamanan dan diharapkan ke depannya akan tetap memainkan peran tersebut sehingga dapat menopang kesatuan bangsa dan NKRI (Herdiansah, 2016).

Banyak penelitian yang mengungkap peranan Ormas atas eksistensinya di masyarakat. Namun, peranan Ormas yang bersifat positif seringkali ditutupi oleh pemberitaan media yang lebih banyak meliput tentang kekerasan yang dilakukan sejumlah Ormas di Indonesia. Niam (2014) meneliti tentang Ormas Islam dan Isu Keislaman di Media Massa. Penelitian ini dilakukan terhadap media besar di Indonesia (Koran Kompas, Jawa Pos dan Surya) selama tahun 2012 yang utamanya mengenai Islam dan kekerasan, hukum dan politik. Ketertarikan media berkaitan dengan kekerasan dan agama ini memberikan dampak yang cukup luas bagi masyarakat. Pers dengan segala atribut kebebasannya memberikan informasi terhadap masyarakat yang pada kenyataannya tidak jarang menimbulkan kejadian-kejadian baru sebagai reaksi atas berita yang dimuat oleh media massa. Ada kalanya reaksi tersebut ditunjukkan dengan tindakan menyerang balik terhadap pers. Ada juga yang kemudian melakukan boikot pers. Kejadian selama satu tahun 2012 merupakan gambaran besar yang melibatkan pelaku Ormas Islam maupun pelaku non-ormas Islam selama periode tahun 2012.

Selama tahun 2012, berita yang melibatkan Ormas Islam sebesar 42,5% atau sebanyak 315 judul berita. Sedangkan berita yang terkait pelaku non-Ormas Islam atau sebanyak 426 judul berita. Frekuensi Ormas Islam sebagai pelaku pemberitaan menempatkan isu kekerasan dalam porsi 47,6% lebih banyak dibandingkan dengan yang terkait isu hukum dan politik yang besarnya mencapai 42,2%. Isu lainnya yang melibatkan pelaku Ormas Islam hanya memperoleh proporsi sebesar 10,2%. Selain itu, isu-isu seputar hukum dan politik juga dimainkan oleh Ormas Islam. Kedekatan Ormas Islam dengan isu kekerasan, hukum dan politik ini karena memang kecenderungan Ormas Islam baik yang berhaluan kiri maupun kanan/radikal tidak bisa dilepaskan dengan isu-isu tersebut. Ormas Islam secara normatif memiliki modal sosial, kapital dan dukungan intelektual secara mudah masuk pada wilayah-wilayah yang tidak mungkin dialami oleh pelaku individual.

Terdapat beberapa kajian lain mengenai Organisasi Masyarakat di Indonesia, dengan fokus yang melibatkan Organisasi Masyarakat dengan ranah politik praktis. Seperti kajian yang dilakukan oleh Prameswari (2015) yang meneliti tentang keterlibatan Organisasi Masyarakat Laskar Bali dalam Pilgub Bali 2013. Penelitiannya memaparkan keterlibatan tersebut disebabkan adanya relasi atau hubungan yang terjalin antara pengurus Laskar Bali dengan salah satu kandidat dari Pilgub Bali 2013, yang menyebabkan Ormas tersebut tidak berjalan sesuai dengan visi misi organisasi yang menjadi dasar terbentuknya Ormas Laskar Bali. Lebih lanjut disebutkan hubungan yang terjalin diantara Ormas Laskar Bali dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan di Bali merupakan suatu hubungan simbiosis

mutualisme terutama pada masa pemilihan kepala daerah dimana Ormas menjadi rebutan dalam rangka mendapatkan dukungan politik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan kunci seperti Korlap (Kordinator Lapangan) Ormas Laskar Bali yang berada di setiap daerah di Bali. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pluralis sebagai kerangka teori. Pada dasarnya teori pluralis menyatakan jika kebanyakan isu-isu politik yang ada berasal dari kelompok-kelompok yang bersaing antara satu dengan yang lain. Biasanya, salah satu dari kelompok yang bersaing ini memiliki kekuatan yang lebih sehingga bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kelompok kepentingan yang memiliki sumber daya yang menjadi kekuatan ketika bersaing dengan kelompok lain seperti popularitas, keterampilan dalam kepemimpinan, dukungan dari masyarakat. Dalam kelompok kepentingan, semua kelompok memiliki beberapa sumber daya yang menjadi kekuatan mereka namun yang bisa dikuasai oleh mereka hanya beberapa, bukan secara keseluruhan. Di dalam persaingan yang terjadi diantara kelompok kepentingan, tidak ada kelompok yang paling berkuasa namun tidak ada kelompok yang paing lemah. Teori pluralis juga menekankan, tidak ada elit yang akan selalu berkuasa. Akan selalu terjadi pergeseran kekuasaan dengan permasalahan dan keadaan yang berbeda. Ketika suatu kelompok kepentingan mengalami kegagalan, maka seringkali kelompok ini akan mencari kelompok lain yang dapat diajak untuk berkompromi dan bekerja sama untuk menghimpun sebuah kekuatan. Suatu

kelompok tidak selalu bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan tetapi dapat menjatuhkan kelompok lain yang tidak mereka sukai.

Hasil penelitian ini menunjukkan Ormas Laskar Bali berperan besar dalam memenangkan Pasangan Mangku Pastika dan Sudikerta pada Pilkada Bali Tahun 2013. Peran Ormas ini antara lain pengamanan suara pasangan kandidat “Pasti-Kerta”, dan menjadi saksi di setiap TPS dan memasang Baliho. Keterlibatan Ormas ini berawal dari hubungan yang terjalin antara Sekjen Laskar Bali dengan Mangku Pastika dimana keterlibatan tersebut dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Temuan lainnya adalah adanya dinamika internal di dalam Ormas Laskar Bali dimana terdapat konflik antar individu dan kelompok di dalam organisasi, dimana terdapat perbedaan pilihan kandidat Kepala Daerah yang menyebabkan diberhentikannya salah satu Korlap (koordinator lapangan) yang memasang Baliho dari lawan politik pasangan Pasti-Kerta.

Keterlibatan Ormas di Bali dalam ranah politik juga dinyatakan oleh Putra et al., (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Partai Politik di Kecamatan Sukawati. Penelitian tersebut dilakukan pada lingkungan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengungkap keterlibatan Ormas dalam partai politik dalam beberapa kegiatan diantaranya memberikan pengawalan dalam kegiatan partai politik, hadir dalam undangan rapat partai politik, memberikan dan mencarikan dukungan bagi anggota partai politik, menjalin kerjasama dan kesepakatan antara anggota Ormas dengan

anggota partai politik serta pemasangan atribut kampanye oleh anggota Ormas maupun partai politik. Hasil penelitian lainnya adalah strategi yang dilakukan Ormas untuk masuk ke partai politik dengan menggunakan akses kedekatan dari anggota Ormas dengan anggota partai politik.

Hal menarik yang juga jadi temuan penelitian ini adalah kesulitan yang diakui oleh Ormas dalam menghadapi partai politik. Kesulitan tersebut antara lain susahnya anggota Ormas untuk menolak ajakan ikut serta dalam kegiatan partai politik, sulitnya anggota Ormas menyepakati bentuk kesepakatan kerjasama dengan partai politik serta ruang gerak anggota Ormas dalam menyampaikan pendapat karena anggota Ormas hanya difungsikan sebagai bentuk dukungan dan bentuk pengamanan atau pengawalan saja dalam partai politik tersebut. Dalam hal ini anggota Ormas merasa dirugikan karena bentuk kepercayaan dari masyarakat terhadap keberadaan dan aktifitas Ormas akan dinilai sebagai bentuk keberpihakan politik oleh masyarakat.

Kajian tentang Ormas di Bali lebih banyak mengenai keterlibatan Ormas dalam ranah politik yakni sebagai wadah mobilisasi massa bagi partai politik. Sementara kajian Ormas di daerah lain di Indonesia lebih banyak mengarah kepada Ormas yang berafiliasi terhadap agama tertentu. Seperti Penelitian Novianti (2015) yang berjudul Peran Ormas Islam dalam Membina Keberagaman Remaja (2008) yang menggambarkan peran Ormas Islam sebagai pendidik yang lebih cenderung kepada penanaman nilai-nilai (ajaran) agama yang bersifat normative dan *ubudiyah* terutama dalam pembinaan pelaksanaan ibadah (shalat dan puasa). Sementara pembinaan keberagaman yang menyangkut masalah-masalah sosial seperti

penyelesaian konflik, pengembangan diri remaja yang meliputi pendidikan yang bersifat kewiraswastaan dan masalah narkoba serta AIDS masih perlu ditingkatkan.

Penelitian lain mengenai Organisasi Masyarakat dilakukan oleh Irawan (2019) yang melakukan studi etnografi komunikasi pada Organisasi Persatuan Islam. Penelitian tersebut bertujuan untuk memotret organisasi Persatuan Islam sebagai komunitas tutur dengan menggunakan paradigma konstruktivis. Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini; pertama, aktivitas komunikasi Persatuan Islam mencakup peristiwa komunikasi yang terjadi pada konteks formal maupun informal. Dalam tindakan komunikasi, jamaah Persatuan Islam mengacu pada pola umum budaya Indonesia, khususnya budaya Sunda. Kedua komponen komunikasi Persatuan Islam dipengaruhi oleh beberapa unsur. Pertama, dalam genre lelucon jamaah Persatuan Islam cenderung keras dan sering bermuatan satire. Kedua dalam genre salam jamaah Persatuan Islam memiliki berbagai jenis salam yang digunakan sesuai dengan peristiwa komunikasi tertentu. Ketiga dalam varietas bahasa, Persatuan Islam dipengaruhi oleh bahasa arab. Kesimpulan ketiga dari penelitian ini adalah kompetensi komunikasi Persatuan Islam dalam linguistik dikategorikan sebagai masyarakat trilingual. Selanjutnya dalam kompetensi interaksi, jamaah Persatuan Islam menunjukkan kohesifitas kolektif, menjaga jarak interaksi dengan lembaga dan aktivitas politik. Kesimpulan terakhir, terdapat tiga hal yang mempengaruhi kompetensi kebudayaan jamaah Persatuan Islam yaitu latar belakang historis, budaya Sunda dan yang paling dominan adalah pemahaman keagamaan.

Penelitian dengan fokus Ormas yang berafiliasi keagamaan juga dilakukan oleh Syamsuri (2016) yang menggunakan studi fenomenologi dengan pendekatan kualitatif dengan kajian teoritik komunikasi kelompok yang subyektivis. Sebagai pemeta jalan, penelitian yang berjudul pola komunikasi kelompok komunitas Muballig Kota Makassar ini menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens dan teori dramaturgi dari Erving Goffman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi muballig kelompok masyarakat di Makassar mengandung nilai-nilai kehidupan beragama, melalui simbol-simbol yang dipertukarkan pada setiap lapisan strata. Realitas sosial kehidupan di kota Makassar menampilkan simbol-simbol keagamaan yang menunjukkan adanya solidaritas dan kelompok-kelompok-kelompok solidaritas. Pola komunikasi dalam kelompok masyarakat muballig di Kota Makassar adalah pola terpadu berdasarkan polarisasi ideologi mengacu pada organisasi massa, partai politik dan lembaga propaganda di Makassar.

Terdapat benang merah dari beberapa kajian mengenai *Organized Crime* dan eksistensi Ormas di Indonesia, yaitu loyalitas anggota kelompok terhadap organisasinya meskipun Organisasi Masyarakat seringkali dikaitkan dengan aktivitas illegal bahkan cenderung kriminal. Pemberitaan negatif mengenai Organisasi masyarakat tidak mempengaruhi loyalitas anggota terhadap organisasinya. Sebaliknya, kebanggaan mereka sebagai anggota dari organisasi tersebut ditunjukkan dengan menonjolkan identitas organisasi masyarakatnya seperti penggunaan baju kaos dengan identitas Ormas hingga menggunakan tato lambang dari Ormas tersebut. Secara psikologis, kesetiaan dan kepatuhan pada kelompok, perasaan senasib dan sepenanggungan disebut konformitas.

Konformitas ini muncul karena adanya kesamaan minat, nilai dan norma yang dianut oleh anggota kelompok, serta adanya interaksi yang terus menerus dalam suatu kelompok tertentu.

Dari penelitian-penelitian mengenai ormas yang pernah dibuat, belum ditemukan bagaimana pola komunikasi yang terjadi pada organisasi masyarakat yang diteliti. Meskipun memiliki afiliasi yang berbeda, seperti politik, ekonomi, agama maupun budaya terdapat kesamaan praktek komunikasi yang dilakukan oleh anggota Ormas di Indonesia. Organisasi Masyarakat di Bali, memiliki anggota yang ikatan yang kuat, loyalitas dengan tingkat kepatuhan yang tinggi pada organisasi. Sikap lainnya adalah sangat menghormati patron atau petinggi organisasi sehingga menjadikan setiap ucapan dan tindakan pemimpin organisasinya sebagai pedoman dalam berperilaku. Hal inilah yang mendasari penelitian ini, untuk dapat memetakan pola komunikasi yang terjadi pada organisasi masyarakat, sehingga dapat menggambarkan model komunikasi yang digunakan oleh Organisasi Masyarakat di Bali.

Berbeda dengan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda yaitu salah satu Ormas Pemuda Bali Bersatu yang merupakan salah satu Ormas besar di Bali, dan dinyatakan sebagai *organized crime* oleh Kapolda Bali. Dengan menggunakan pendekatan etnografi komunikasi, penelitian ini akan menguraikan bagaimana pola dan fungsi komunikasi yang dilakukan ormas secara menyeluruh yakni dari aspek budaya yang bersifat material hingga yang bersifat abstrak seperti pengalaman, kepercayaan dan

norma serta sistem nilai yang dianut oleh kelompok yang diteliti dalam konteks ini adalah ormas itu sendiri.

Adapun ringkasan penelitian sejenis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Review Penelitian Sejenis

| No | Judul & Nama Peneliti | Sumber | Tujuan | Paradigma/ Metode | Teori yang digunakan | Perbedaan penelitian |
|----|---|---|--|-------------------------|---|--|
| 1 | Harkristuti Harkrisnowo (2004), Transnational Organized Crime dalam perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi | <i>Indonesian Journal of International Law</i> , 1(2). http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/IJIL/article/view/2725 | Mengkritisi penanganan organized crime di Indonesia yang kurang serius | Kritis/ Kualitatif | Konsep Organized Crime dan White Collar Crime | Penelitian ini dianalisis dengan perspektif hukum dan kriminologi, mengamati keberadaan <i>organized crime</i> di Indonesia dan penanganannya oleh pemerintah, sementara penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus pada pola komunikasi ormas PBB di Bali |
| 2 | Moritz Schuberth (2015), <i>The Challenge of Community-Based Armed Groups: Towards a Conceptualization of Militias, Gangs, and Vigilantes, Contemporary Security Policy</i> | <i>Contemporary Security Policy</i> , 36(2), 296–320. https://doi.org/10.1080/13523260.2015.1061756 | Memaparkan bagaimana persepsi tentang kelompok bersenjata paroki yang tidak didorong oleh ideologis atau tujuan agama. | Interpretif/ Kualitatif | Konsep Kebijakan Keamanan Kontemporer | Penelitian ini mencermati konsep kelompok bersenjata non negara dan kelompok bersenjata berbasis komunitas, sementara penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk melakukan pemolaan komunikasi Ormas yang dinyatakan sebagai <i>Organized Crime Organization</i> |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|--------------------------------|--|
| 3 | Diane E. Davis (2009), "Non-State Armed Actors, New Imagined Communities, and Shifting Patterns of Sovereignty and Insecurity in the Modern World, <i>Contemporary Security Policy</i> " | <i>Contemporary Security Policy</i> , 30:2, 221-245, DOI: 10.1080/13523260903059757 | Memetakan proliferasi dan signifikansi aksi bersenjata non-negara yang terstruktur di sekitar kegiatan ekonomi, dan menilai sifat kekerasan dan ketidakamanan yang dihasilkan oleh kegiatan ini sebagai perbandingan untuk tindakan non-negara yang lebih berorientasi politik konvensional. | Konstruktivis / Kualitatif | Non State Armed Actors Concept | Penelitian ini memiliki fokus studi terhadap aksi aktor bersenjata non negara yang terstruktur di kegiatan ekonomi dan politik sementara penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus pada pola komunikasi kelompok bersenjata non negara (ormas) |
| 4 | Ceccarelli, A. (2007), <i>Clans, politics and organized crime in Central Asia</i> | <i>Trends in Organized Crime</i> , 10(3), 19–36. https://doi.org/10.1007/s12117-007-9011-z | Memaparkan peran kejahatan transnasional terorganisir dalam proses demokratisasi di kawasan Asia Tengah, menyelidiki koneksi yang ada antara keluarga | Interpretif/ Kualitatif | Konsep demokratisasi global | Penelitian ini memiliki fokus pada praktik <i>organized crime</i> dalam proses demokratisasi di kawasan Asia Tengah sementara fokus penelitian yang akan dilakukan pada pola komunikasi ormas PBB di Bali |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | terkemuka (klan), elit politik dan kejahatan terorganisir, serta mengeksplorasi bagaimana jaringan kriminal telah berkembang biak di masyarakat dan akibatnya dalam politik | | | |
| 5 | Kemp, L., Zolghadriha, S., & Gill, P. (2020). <i>Pathways into organized crime: comparing founders and joiners</i> | <i>Trends in Organized Crime</i> , 23(3), 203–226. https://doi.org/10.1007/s12117-019-09371-w | Mengidentifikasi perbedaan yang signifikan dalam proses keterlibatan antara pelaku yang bergabung (<i>joiners</i>) atau pendiri (<i>founders</i>) <i>organized crime</i> . | Positivistik/ Analisis konten dan analisis Kuantitatif | Konsep Faktor Resiko, Early life experiences, Criminal trajectories, Turning points and social influences | Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan antara anggota dan pimpinan <i>organized crime</i> , sementara penelitian yang akan dilakukan menyelidiki pola komunikasi yang terjadi pada anggota ormas |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------|---|---|
| 6 | Albanese, J. S. (2000). The Causes of Organized Crime: Do Criminals Organize Around Opportunities for Crime or Do Criminal Opportunities Create New Offenders? | <i>Journal of Contemporary Criminal Justice</i> , 16(4), 409–423. https://doi.org/10.1177/1043986200016004004 | Mengembangkan model prediksi yang menentukan hubungan antara peluang kriminal, lingkungan kriminal (pelaku), dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas kejahatan terorganisir (<i>organized crime</i>) | Konstruktivis / Kualitatif | Model <i>Criminal Opportunity-Organized Crime Group Interaction</i> | Studi ini merupakan upaya awal untuk mengembangkan model prediksi yang menentukan hubungan antara peluang kriminal, lingkungan kriminal (pelaku), dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencegah aktivitas kejahatan terorganisir, sementara penelitian yang akan dilakukan akan melihat pola komunikasi ormas |
| 7 | Dede Irawan (2018). Studi Etnografi Komunikasi pada Organisasi Persatuan Islam | <u>Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi</u> , 2(1), 55–70. https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.5057 | Memotret Organisasi Persatuan Islam sebagai komunitas tutur | Interpretif/ Kualitatif | Etnografi Komunikasi Dell Hymes | Perbedaan penelitian terletak pada subyek, dimana penelitian tersebut dilakukan pada Organisasi Persatuan Islam |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------|--|---|
| 8 | Syamsuri, P., Datokrama Palu, I., & Kunci, K. (2016). Pola komunikasi Kelompok Komunitas Muballig Kota Makasar. | Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 10(2), 199–221. https://doi.org/10.15575/jid.v10i1.334 | Menggambarkan Pola Komunikasi Komunitas Mubalig Kota Makassar | Interpretif/ Kualitatif | Teori Strukturasi dari Anthony Giddens dan teori dramaturgi dari Erving Goffman. | Penelitian ini menggambarkan pola komunikasi komunitas Muballig Kota Makassar, sementara penelitian yang akan dilakukan akan meneliti pola komunikasi anggota Ormas yang dikategorikan sebagai <i>Organized Crime</i> |
| 9 | Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. | Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, 1(1), 49–67. https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.1185.g5034 | Menguraikan tentang tinjauan kritis peran Organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. | Kritis/ Kualitatif | Konsep Ormas dan LSM (Holloay, 1997) | Penelitian ini menguraikan peran Ormas dalam menopang pembangunan di Indonesia, sementara penelitian yang akan dilakukan akan menguraikan perilaku komunikasi Ormas PBB di Bali untuk menemukan pola komunikasi anggota Ormas tersebut. |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|----------------------------|--|---|
| 10 | Prameswari, P. I. (2015). Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013. In Jurnal Politik Muda (Vol. 4, Issue 1). | Jurnal Politik Muda (Vol. 4, Issue 1). http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm3247d10b50full.pdf | Memaparkan keterlibatan Ormas Laskar Bali dalam Pemilihan Gubernur Bali tahun 2013 | Interpretif/ Kualitatif | Teori Prularism dalam konteks <i>Voluntary Organizations</i> | Penelitian ini memaparkan keterlibatan Ormas Laskar Bali dalam Pilgub 2013, sementara penelitian yang akan dilakukan meneliti perilaku komunikasi anggota Ormas Pemuda Bali Bersatu (PBB) |
| 11 | Putra, W., Sukma, W., Dewa, D., Sanjaya, B., Si, M., Suastika, N., Pd, S., Pd, M., & Ppkn, J. (2013). Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Partai Politik di Kecamatan Sukawati | Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (Vol. 1, Issue 1). https://doi.org/10.23887/JPKU.V1I1.372 | Memaparkan keterlibatan Ormas dalam partai politik di Kecamatan Sukawati Kabpaten Gianyar Bali | Interpretif/ Kualitatif | Konsep Ormas dalam UU No 8 Tahun 1985 | Penelitian ini meneliti keterlibatan Ormas dalam ranah politik sementara pada penelitian yang akan dilakukan akan diteliti perilaku komunikasi Ormas PBB di Bali |
| 12 | Novianti, I. (2015). Peran Ormas Islam dalam Membina Keberagaman Remaja. | KOMUNIKA, 2(2), 250. https://doi.org/10.24090/kom.v2i2.2008.pp250-259 | Memaparkan peran Ormas Islam dalam membina keberagaman remaja | Interpretif/ Kualitatif | Konsep Sosiologi Agama | Penelitian ini memaparkan peran Ormas Islam dalam masyarakat, khususnya dalam membina keberagaman remaja, sementara penelitian yang akan dilakukan akan meneliti perilaku |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------|--|------------------------|--|--|
| | | | | | | komunikasi Ormas PBB di Bali |
| 13 | Ormas Islam dan Isu Keislaman di Media Massa | Khoirum Niam (2014) | Menyajikan isu-isu Islam yang diberitakan oleh koran Kompas, Jawa Pos, dan Surya selama tahun 2012, terutama mengenai Islam dan kekerasan, hukum dan politik | Kritis/ Kuantitatif | Peta Kebudayaan Clifford Geertz (1992) | Penelitian ini menyajikan trend Ormas Islam dan Isu ke-islaman tahun 2012 sementara penelitian yang akan dilakukan akan meneliti perilaku komunikasi Ormas PBB di Bali |

Sumber: diolah peneliti

1.4.2 Landasan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola komunikasi anggota organisasi masyarakat di Bali. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dapat membantu mengarahkan peneliti dalam menggambarkan pola komunikasi anggota ormas tersebut. Teori-teori tersebut antara lain Teori identitas sosial, teori interaksi simbolik dan teori konvergensi simbolik.

1.4.2.1 Teori Identitas Sosial

Terdapat beberapa perspektif mengenai identitas sosial. Turner dalam Hogg & Abrams (1998) mendefinisikan identitas sosial sebagai “pengetahuan individu bahwa seseorang milik kelompok sosial tertentu bersama-sama dengan beberapa makna emosional dan nilai dari keanggotaan kelompok, dimana kelompok sosial adalah dua atau lebih individu yang berbagi identifikasi sosial baik umum maupun pribadi atau yang hampir sama, artinya menganggap diri mereka sebagai anggota dari kategori sosial yang sama. Definisi ini menyampaikan beberapa aspek fundamental dari pendekatan identitas sosial. Identitas, khususnya identitas sosial dan rasa memiliki dalam suatu kelompok yang berkaitan erat dalam arti bahwa konsepsi seseorang atau identitas seseorang sebagian besar terdiri dari self-deskripsi dalam hal karakteristik mendefinisikan kelompok-kelompok sosial yang mereka miliki. Kedekatan ini bersifat psikologis, tidak hanya pengetahuan tentang atribut kelompok. Identifikasi dengan kelompok sosial adalah keadaan psikologis yang sangat berbeda dari keadaan ketika masuk ke dalam satu kategori sosial atau yang lain. Hal ini fenomena nyata dan memiliki konsekuensi diri evaluatif yang penting.

Jadi menurut teori tersebut, dijelaskan bahwa identitas sosial merupakan atribut yang dimiliki oleh seseorang individu dimana individu tersebut merupakan bagian dari suatu kelompok sosial, atribut tersebut kemudian digunakan untuk memperkenalkan adanya

kelompok sosialnya dan membedakan kelompok sosialnya dengan kelompok lain. Kedekatan yang dibangun dalam kelompok ini tidak hanya dalam bentuk kedekatan fisik misalnya intensitas dalam pertemuan, namun juga kedekatan psikologis dimana sesama anggota dalam suatu kelompok memiliki tujuan dan pemikiran yang sama.

Menurut Hogg & Abrams (1998) pendekatan identitas sosial bertumpu pada asumsi-asumsi tertentu tentang sifat manusia dan masyarakat serta keterkaitan mereka. Secara khusus, seseorang mempertahankan bahwa masyarakat terdiri dari kategori sosial yang berdiri dalam kekuasaan dan status hubungan satu sama lain. Kategori sosial mengacu pada pembagian masyarakat atas dasar kebangsaan, ras, kelas, pekerjaan, jenis kelamin, agama dan sebagainya, sedangkan “hubungan kekuasaan dan statusnya” mengacu pada fakta bahwa beberapa kategori dalam masyarakat memiliki kekuatan besar, prestise, status dan sebagainya, daripada yang lain.

Orang memperoleh identitas (diri dan konsep diri) mereka sebagian besar merupakan kategori sosial darimana mereka berasal. Individu memiliki banyak kategori sosial yang berbeda dan dengan demikian berpotensi memiliki banyak identitas yang berbeda. Ini dapat dibayangkan bahwa pengalaman hidup dua orang dapat menjadi identik, sehingga tidak dapat dihindari bahwa kita semua memiliki kejadian unik dan berbeda (misalnya pengalaman yang mirip dengan orang lain untuk berbagai derajat). Dengan cara ini kita dapat menjelaskan keunikan yang jelas pada setiap individu manusia; setiap manusia secara unik ditempatkan dalam struktur sosial dan dengan demikian unik (P. L. Berger & Luckmann, 1966).

Sherman dalam (Baron & Byrne, 2003) menyatakan setiap orang berusaha membangun sebuah identitas sosial (*social identity*), sebuah representasi diri yang membantu kita mengonseptualisasikan dan mengevaluasikan siapa diri kita. Dengan mengetahui siapa diri kita, kita akan dapat mengetahui siapa diri kita (*self*) dan siapa yang lain (*others*). Teori ini menjelaskan bahwa hubungan sosial bermasyarakat setiap individu akan membangun identitas sosialnya masing-masing sesuai kebutuhannya. Dengan adanya identitas yang dimiliki,

seseorang akan lebih mudah mengetahui dan dikenal oleh khlayak dari kelompok sosial mana dan secara otomatis menjadi evaluasi bagi diri sendiri dari kategori sosial mana seseorang berasal dan identitas sosial apa saja yang melekat pada diri kita sendiri.

Lebih jauh, Hogg & Abrams (1998) menyatakan bahwa identitas sosial secara umum dipandang sebagai analisa tentang hubungan-hubungan intergroup antar kategori sosial dalam skala besar selain diartikan sebagai proses pembentukan konsepsi kognitif kelompok sosial dan anggota kelompok. Lebih sederhana lagi identitas sosial adalah kesadaran diri secara khusus diberikan kepada hubungan antar kelompok dan hubungan antar individu dalam kelompok. Pembentukan kognitif sosial banyak dipengaruhi oleh pertemuan antara anggota individu dalam kelompok, orientasi peran individu dan partisipasi individu dalam kelompok sosial.

Henry Tajfel dan John Turner dalam West & Turner (2010) menyadari pentingnya diri dan hubungannya dengan identitas kelompok dimana identitas sosial seseorang ditentukan oleh kelompok dimana ia tergabung. Orang yang termotivasi untuk bergabung dengan kelompok yang paling menarik dan atau memberikan keuntungan bagi kelompok dimana ia tergabung di dalamnya. Lebih lanjut, Turner dan Tajfel mengamati bahwa orang berjuang untuk mendapatkan atau mempertahankan identitas sosial yang positif dan ketika identitas sosial dipandang tidak memuaskan, mereka akan bergabung dengan kelompok dimana mereka merasa lebih nyaman atau membuat kelompok dimana mereka sedang tergabung sebagai tempat yang lebih menyenangkan.

Menurut Hogg & Abrams (1998), teori identitas sosial telah menyarankan bahwa ada dua kelas yang luas dalam identitas, yang menentukan jenis diri: (1) identitas sosial, yang mendefinisikan dalam hal keanggotaan kelompok dan (2) identitas pribadi, yang menentukan diri dalam hal hubungan pribadi dan sifat-sifat istimewa. Identitas sosial dikaitkan dengan perilaku dalam kelompok dan antar kelompok seperti etnosentrisme, *ingroup bias*, solidaritas kelompok, diskriminasi antarkelompok, kesesuaian, perilaku normative, stereotip dan

prasangka. Identitas pribadi yang terkait dengan hubungan interpersonal yang dekat positif maupun negatif dan dengan perilaku pribadi tertentu.

Kita memiliki banyak identitas sosial karena ada beberapa kelompok yang merasa kita miliki dan banyak identitas pribadi karena ada hubungan interpersonal yang mana kita terlibat dalam klaster dan atribut tertentu yang kita percaya dan kita miliki. Identitas sosial menjadi aspek yang sangat penting dalam konsep diri kita. Baik identitas pribadi maupun identitas sosial mutlak dimiliki oleh setiap individu. Setiap individu bisa dan bebas untuk memiliki bermacam-macam identitas, baik identitas pribadi maupun identitas sosial. Keputusan untuk memiliki banyak identitas bergantung pada kebutuhan individu untuk diakui dengan identitas macam apa, dimana pilihan individu untuk mengategorikan diri dalam identitas dilakukan secara sadar.

Proses identitas sosial terjadi melalui tiga tahapan yaitu *Social categorization*, *Prototype* dan *Depersonalization* (Hogg et al., 2004). Kategori sosial berdampak pada definisi diri, perilaku, persepsi pada *prototype* yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Ketika ketidakmenentuan identitas ini terjadi, maka konsepsi tentang diri dan sosialnya juga tidak jelas. *Prototype* juga bisa menjadi sebuah momok bagi kelompok sosial. Dengan memberikan *prototype* yang berlebihan pada kelompoknya, maka penilaian yang dilakukan kepada kelompok lain adalah jelek. *Stereotype* akan muncul pada kondisi seperti ini, dimana *stereotype* muncul dari kognisi individu dalam sebuah kelompok. *Stereotype* juga bisa muncul dari kelompok satu terhadap kelompok lain yang berada diluar dirinya.

Secara kognitif, orang akan merepresentasikan kelompok-kelompoknya dalam bentuk *prototype-prototype*. Selain itu atribut-atribut yang menggambarkan kesamaan dan hubungan struktur dalam kelompok. Hal ini dilakukan untuk membedakan dan menentukan keanggotaan kelompok. *Prototype* adalah konstruksi sosial yang terbentuk secara kognitif yang disesuaikan dengan pemaksimalan perbedaan yang dimiliki oleh kelompok dengan kelompok lainnya. Hal

ini dilakukan untuk menonjolkan keunggulan kelompoknya. Kepentingan dari kelompok untuk membentuk *prototype* adalah untuk merepresentasikan kelompoknya di wilayah sosial yang lebih luas. Biasanya *prototype* itu berdiri sendiri, tidak semata-mata ditopang atau didapat dari adanya perbandingan antar kelompok sosial. Dengan demikian proses yang terjadi dalam kelompok sosial tidak mungkin keluar dari kelompok ini. Perlu diketahui bahwa *prototype* itu senantiasa berkembang dari waktu ke waktu.

Prototype juga bisa dianggap sebagai representasi kognitif dari norma kelompok, dimana norma kelompok tersebut dibentuk atas regulasi sosial yang hanya dibatasi oleh kelompok. Hal yang paling penting dalam hal ini adalah penjelasan perilaku dan penegasan posisi bahwa dia adalah kelompok sosial tertentu. Norma sosial merupakan aturan yang dibuat atas kesepakatan anggota kelompoknya yang menjadi landasan dalam berpikir dan bergerak kelompok. Dengan demikian norma sosial tidak menjadi penjelasan keadaan sosial namun mengatur tentang bagaimana individu dalam kelompok harus bersikap dan berperilaku. Sementara *depersonalization* atau depersonalisasi adalah proses dimana individu menginternalisasikan bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya atau memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan dan bukannya individu yang unik.

Baron, R. A, & Byrne (2003) menyebutkan bahwa identitas sosial tidak datang dengan sendirinya. Dalam pembentukan suatu identitas, ada proses motivasi-motivasi. Hogg et al., (2004) memberikan penjelasan bahwa dalam proses pembentukan identitas, individu memiliki dua motivasi, yaitu (1) *Self Enhancement* (peningkatan diri) yang dimanfaatkan oleh individu untuk memajukan atau menjaga status kelompok mereka terhadap kelompok lain yang berada diluar dirinya. Selain itu juga berfungsi untuk mengevaluasi identitas kolektif. Dalam konteks kelompok yang menonjol, *Self Enhancement* dalam penjelasan Hogg dapat dimaknai sebagai *Collective Self* atau identitas sosial. (2) *Uncertainty Reduction* atau pengurangan

ketidakpastian dilakukan untuk mengetahui posisi kondisi sosial dimana seseorang berada. Tanpa motivasi ini individu tidak akan mengetahui dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya dan sekaligus berfungsi untuk pembentukan *prototype* identitas sosial.

Menurut Tajfel (1982), identitas sosial terdiri dari tiga komponen utama, yaitu komponen kognitif, komponen evaluatif dan komponen emosional. Komponen kognitif berupa kesadaran kognitif akan keanggotaannya dalam kelompok, seperti *self categorization*. Individu mengkategorisasikan dirinya dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Komponen ini juga berhubungan dengan *self stereotyping* yang menghasilkan identitas pada diri individu dan anggota kelompok lain yang satu kelompok lainnya, yang dapat memunculkan perilaku kelompok.

Komponen identitas sosial yang kedua yaitu komponen evaluatif yang merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaannya dalam kelompok seperti *self esteem* (harga diri atau kebanggaan kelompok). Komponen ini menekankan pada nilai-nilai yang dimiliki individu terhadap keanggotaan kelompoknya.

Komponen identitas sosial yang ketiga adalah komponen emosional. Komponen ini merupakan keterlibatan emosional terhadap kelompok, seperti komitmen afektif. Komponen emosional ini lebih menekankan pada seberapa besar perasaan emosional yang dimiliki individu terhadap kelompoknya. Komitmen afektif cenderung kuat dalam kelompok yang dievaluasi secara positif karena kelompok lebih berkontribusi terhadap identitas sosial yang positif. Hal ini menunjukkan keterlibatan emosionalnya yang kuat terhadap kelompoknya walaupun kelompoknya diberikan karakteristik negatif.

Hogg & Vaughan (2010) menjelaskan bahwa identitas sosial tidak hanya mendeskripsikan atribut, namun juga menentukan cara proses berpikir dan perilaku individu

sebagai anggota kelompok, termasuk pada cara dan pola mereka berkomunikasi. Teori identitas sosial digunakan dalam penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana anggota-anggota organisasi masyarakat Pemuda Bali Bersatu membangun kesadarannya dan membentuk identitas social sebagai ormas yang teridentifikasi sebagai *organized crime organization*. Dengan demikian maka dapat pola komunikasi anggota *organized crime organization* dapat digambarkan secara mendetail.

1.4.2.2 Teori Interaksi Simbolik

Interaksi Simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Persepektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri mereka sendiri menentukan perilaku manusia. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial (Mulyana, 2001).

Menurut teori Interaksi Simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, dimana mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial (Berger, 2004).

Secara ringkas Teori Interaksi Simbolik didasarkan pada premis-premis berikut:

1. Individu merespon suatu situasi simbolik, mereka merespon lingkungan termasuk obyek fisik (benda) dan obyek sosial (perilaku manusia) berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka.
2. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melihat pada obyek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa, negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya obyek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran obyek fisik, tindakan atau peristiwa tersebut) namun juga gagasan yang abstrak.
3. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial, perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri.

Dalam menyusun teori Interaksi Simbolik, Mead mengambil tiga konsep kritis yang diperlukan dan saling mempengaruhi satu sama lain yaitu *Mind*, *Self* dan *Society*. Tiga konsep tersebut dan hubungan diantara ketiganya dijelaskan dalam buku *Mind, Self and Society* yang merupakan inti pemikiran Mead sekaligus menjadi *keywords* dalam teori tersebut. Interaksionime Simbolik secara khusus menjelaskan tentang bahasa, interaksi sosial dan reflektivitas.

- *Mind* (pikiran) didefinisikan sebagai proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan di dalam diri individu, pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran, proses sosial bukanlah produk dari pikiran. Jadi pikiran juga didefinisikan secara fungsional ketimbang secara substansif. Karakteristik istimewa dari pikiran adalah kemampuan individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas secara

keseluruhan. Itulah yang dinamakan pikiran. Melakukan sesuatu berarti memberi respon terorganisir tertentu, dan bila seseorang mempunyai respon itu dalam dirinya, ia mempunyai apa yang kita sebut pikiran. Dengan demikian pikiran dapat dibedakan dari konsep logis lain seperti konsep ingatan dalam karya Mead melalui kemampuannya menanggapi komunitas secara menyeluruh dan mengembangkan tanggapan yang terorganisir.

Mead juga melihat pikiran secara pragmatis, yakni pikiran melibatkan proses berpikir yang mengarah pada penyelesaian masalah. Berpikir menurut Mead adalah suatu proses dimana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui proses interaksi dengan diri sendiri itu, individu memilih mana diantara stimulus yang tertuju kepadanya itu akan ditanggapinya.

Simbol juga digunakan dalam (proses) berpikir subyektif, terutama simbol-simbol bahasa. Hanya saja simbol itu tidak dipakai secara nyata, yaitu melalui percakapan internal. Serupa dengan itu, secara tidak kelihatan individu itu menunjuk pada dirinya sendiri mengenai diri atau identitas yang terkandung dalam reaksi-reaksi orang lain terhadap perilakunya. Maka, kondisi yang dihasilkan adalah konsep diri yang mencakup kesadaran diri yang dipusatkan pada diri sebagai obyeknya (Wirawan, 2014).

Isyarat sebagai simbol-simbol signifikan tersebut muncul pada individu yang membuat respons dengan penuh makna. Isyarat-isyarat dalam bentuk ini membawa pada suatu tindakan dan respon yang dipahami oleh masyarakat yang telah ada. Melalui simbol-simbol itulah maka akan terjadi pemikiran. Esensi pemikiran dikonstruksi dari pengalaman isyarat makna yang terinternalisasi dari proses eksternalisasi sebagai bentuk hasil interaksi dengan orang lain. Oleh karena perbincangan isyarat memiliki

makna, maka stimulus dan respons memiliki kesamaan untuk semua partisipan (Upe, 2010).

- **Self (Diri)**

The Self (Diri) menurut Mead merupakan ciri khas dari manusia yang tidak dimiliki oleh binatang. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek dari perspektif yang berasal dari orang lain atau masyarakat. Tapi diri juga merupakan kemampuan khusus sebagai subjek. Diri muncul dan berkembang melalui aktivitas interaksi sosial dan bahasa. Menurut Mead, mustahil membayangkan diri muncul dalam ketiadaan pengalaman sosial. Karena itu ia bertentangan dengan konsep diri yang soliter dari *Cartesian Picture*. *The Self* juga memungkinkan orang berperan dalam percakapan dengan orang lain karena adanya *sharing of symbol*. Artinya, seseorang bisa berkomunikasi selanjutnya menyadari apa yang dikatakan, menentukan dan mengantisipasi apa yang dikatakan selanjutnya.

Mead menggunakan istilah *significant gestures* (isyarat-isyarat yang bermakna) dan *significant communication* yang menjelaskan bagaimana orang berbagi makna tentang simbol dan merefleksikannya. Ini berbeda dengan binatang, anjing yang menggonggong mungkin akan memunculkan reaksi pada anjing yang lain, tapi reaksi itu hanya sekadar insting, yang tidak pernah diantisipasi oleh anjing pertama. Dalam kehidupan manusia kemampuan mengantisipasi dan memperhitungkan orang lain merupakan ciri khas kelebihan manusia.

Jadi *the self* berkaitan dengan proses refleksi diri, yang secara umum sering disebut sebagai *self control* atau *self monitoring*. Melalui refleksi diri itulah, menurut Mead, individu mampu menyesuaikan dengan keadaan di mana mereka berada, sekaligus menyesuaikan dari makna dan efek tindakan yang mereka lakukan. Dengan kata lain orang secara tidak langsung menempatkan diri mereka dari sudut pandang

orang lain. Dari sudut pandang demikian orang memandang dirinya sendiri dapat menjadi individu khusus atau menjadi kelompok sosial sebagai suatu kesatuan.

Mead membedakan antara “*I*” (saya) dan “*Me*” (aku). *I* (saya) merupakan bagian yang aktif dari diri (*the self*) yang mampu menjalankan perilaku. “*Me*” atau aku merupakan konsep diri tentang yang lain, yang harus mengikuti aturan main, yang diperbolehkan atau tidak. *I* (saya) memiliki kapasitas untuk berperilaku, yang dalam batas-batas tertentu sulit untuk diramalkan, sulit diobservasi, dan tidak terorganisir berisi pilihan perilaku bagi seseorang. Sedangkan “*me*” (aku) memberikan kepada “*I*” (saya) arahan berfungsi untuk mengendalikan “*I*” (saya), sehingga hasilnya perilaku manusia lebih bisa diramalkan, atau setidaknya tidak begitu kacau. Karena itu dalam kerangka pengertian tentang *the self* (diri), terkandung esensi interaksi sosial. Interaksi antara “*I*” (saya) dan “*me*” (aku). Disini individu secara inheren mencerminkan proses sosial.

Seperti namanya, teori ini berhubungan dengan media simbol dimana interaksi terjadi. Tingkat kenyataan sosial yang utama yang menjadi pusat perhatian interaksionisme simbolik adalah pada tingkat mikro, termasuk kesadaran subyektif dan dinamika interaksi antar pribadi.

Ternyata kita tidak hanya menanggapi orang lain, kita juga mempersepsi diri kita. Diri kita bukan lagi personal penanggap tetapi juga personal stimuli sekaligus. Diri (*self*) atau ke-diri-an adalah konsep yang sangat penting bagi teoritis interaksionisme simbolik. Rock dalam Upe (2010) menyatakan “diri merupakan skema intelektual interaksionis simbolik yang sangat penting”. Seluruh proses sosiologis lainnya dan perubahan di sekitar diri itu diambil dari hasil analisis mereka mengenai arti dan organisasi.

Mead menyadari bahwa manusia sering terlibat dalam suatu aktivitas yang di dalamnya terkandung konflik dan kontradiksi internal yang mempengaruhi perilaku yang diharapkan. Mereka menyebut “konflik intrapersonal” yang menggambarkan konflik antara nafsu, dorongan dan lain sebagainya dengan keinginan terinternalisasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan *self*, yang juga mempengaruhi konflik intrapersonal, diantaranya adalah posisi sosial.

Sebagaimana Mead, Blumer memiliki pandangan bahwa seseorang memiliki kedirian (*self*) yang terdiri dari “*I*” dan “*Me*”. Unsur “*I*” merupakan unsur yang terdiri dari dorongan, pengalaman, ambisi dan orientasi pribadi. Sedangkan unsur “*Me*” merupakan “suara” dan harapan-harapan dari masyarakat sekitar. Pandangan Blumer ini sejalan dengan gurunya, yakni Mead, yang menyatakan bahwa dalam percakapan internal terkandung di dalamnya pergolakan batin antara unsur “*I*” (pengalaman dan harapan) dengan unsur “*Me*” (batas-batas normal).

Pemahaman makna dari konsep diri pribadi dengan demikian mempunyai dua sisi, yakni pribadi (*self*) dan sisi sosial (*person*). Karakter diri secara sosial dipengaruhi oleh “teori” (aturan, nilai-nilai dan norma) budaya setempat seseorang berada dan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang dalam budaya tersebut. Konsep diri terdiri dari dimensi yang dipertunjukkan sejauh mana unsur diri berasal dari diri sendiri atau lingkungan sosial dan sejauh mana diri dapat berperan aktif. Dari perspektif ini, tampaknya konsep diri tidak dapat dipahami dari diri sendiri. Dengan demikian, makna dibentuk dalam proses interaksi antar orang dan objek diri, ketika pada saat bersamaan mempengaruhi tindakan sosial. Ketika seseorang menanggapi apa yang terjadi di lingkungannya, ketika itu ia sedang menggunakan sesuatu yang disebut sikap.

- **Society (Masyarakat)**

Pada tingkat paling umum, Mead menggunakan istilah masyarakat (*society*) yang berarti proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat penting perannya dalam membentuk pikiran dan diri. Di tingkat lain, menurut Mead, masyarakat mencerminkan sekumpulan tanggapan terorganisir yang diambil alih oleh individu dalam bentuk “aku” (*me*). Menurut pengertian individual ini, masyarakat memengaruhi mereka, memberi mereka kemampuan melalui kritik diri untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Sumbangan terpenting Mead tentang masyarakat terletak dalam pemikirannya mengenai pikiran dan diri.

Dalam konsep teori Herbert Mead tentang interaksionisme simbolik terdapat prinsip-prinsip dasar yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manusia dibekali kemampuan berpikir, tidak seperti binatang
2. Kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial individu
3. Dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol beserta maknanya yang memungkinkan manusia untuk memaknai kemampuan berpikirnya.
4. Makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak (khusus dan sosial) dan berinteraksi.
5. Manusia dapat mengubah arti dan simbol yang digunakan saat berinteraksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi.
6. Manusia berkesempatan untuk melakukan modifikasi dan perubahan karena berkemampuan berinteraksi dengan diri yang hasilnya adalah peluang tindakan dan pilihan tindakan.
7. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok bahkan masyarakat. Pada intinya perhatian utama dari teori interaksi simbolik adalah tentang terbentuknya kehidupan bermasyarakat melalui proses interaksi serta komunikasi antar

individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami melalui proses belajar.

Ciri khas dari interaksi simbolik terletak pada penekanan manusia dalam langsung antara stimulus response, tetapi didasari pada pemahaman makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol, interpretasi pada akhirnya individu tersebut akan berusaha memahami maksud dan tindakan masing-masing untuk mencapai kesepakatan bersama.

Teori interaksi simbolik juga menekankan pentingnya komunikasi verbal dan non verbal dalam interaksi sosial. Sementara pendekatan etnografi komunikasi menekankan pada bagaimana bahasa digunakan dalam konteks hubungan sosial, interaksi antara individu dan konstruksi makna sosial. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa verbal dan non verbal dan cara komunikasi yang tidak langsung dalam interaksi sosial. Oleh karena itu teori interaksi simbolik dalam penelitian ini membantu menganalisa proses pemaknaan simbol dan nilai yang ditanamkan oleh organisasi kepada anggota dalam rangka membentuk pola komunikasi yang khas antar anggota dan pimpinan organisasi.

1.4.2.3 Teori Konvergensi Simbolik

Teori Konvergensi Simbolik yang dicetuskan oleh Ernest Bormann yang terinspirasi dari riset Robert Bales mengenai komunikasi dalam kelompok-kelompok kecil. Menurut Bales dalam Venus (2007) cerita-cerita tersebut diantaranya meliputi lelucon, kisah, ritual, perumpamaan atau permainan kata-kata, yang ternyata memiliki fungsi penting dalam mengurangi ketegangan kelompok (*tension release*), bahkan mampu meningkatkan kesolidan kelompok. Awalnya penelitian tersebut fokus pada perilaku anggota kelompok, namun di dalam proses penelitian tersebut Bales menemukan kenyataan menarik dimana tersapat kecenderungan dari anggota-anggota kelompok tersebut menjadi dramatis dan berbagi cerita

dimana ketiga kelompok tersebut mengalami ketegangan.

Bales dan rekan-rekannya awalnya mengembangkan dua belas kategori analisis isi untuk studi kelompok kecil. Satu kategori asli, yaitu “menunjukkan pelepasan ketegangan”, kemudian diubah menjadi “mendramatisasi”. Selanjutnya kategori “mendramatisasi” mengarah pada penemuan “peristiwa fantasi kelompok” dimana beberapa komunikasi yang dikodekan sebagai dramatisasi menyebar pada grup. Pada saat terjadinya dramatisasi, orang-orang akan menjadi bersemangat, menyela satu sama lain, tersipu, tertawa, melupakan kesadaran diri mereka. Nada pertemuan, yang biasanya tenang dan tegang berubah menjadi hidup, bersemangat dan riuh. Proses berantai yang melibatkan komunikasi verbal dan non verbal menunjukkan partisipasi dalam “drama” tersebut.

Robert Bales menyebutnya fenomena *Fantasy Theme* yang muncul ketika individu menjadi tegang dan menjadi dramatis dan berbagi cerita. Tema ini merupakan bagian dari tema yang lebih luas dan rumit yang disebut “visi retorik”. Tema ini intinya sebuah tinjauan bagaimana sesuatu itu terjadi, sedang dan akan terjadi. Tema dan visi terdiri dari orang atau karakter. Memiliki alur cerita sebagai aksi atau pengembangan dari cerita itu. Adegannya adalah kumpulan pergaulan sosial kultural. Agen pendukung sebagai sumber yang mensahkan cerita itu (Littlejohn, 2002).

Seringkali drama merupakan cerminan dari situasi kelompok dan hubungannya dengan lingkungan eksternal. Sama seperti masalah yang ditekan individu mungkin muncul dalam fantasi mimpi, begitu pula masalah kelompok mungkin muncul dalam fantasi mimpi, seperti halnya masalah kelompok yang mungkin muncul dalam rantai fantasi dan seorang kritikus mungkin menafsirkan konten manifes dengan tujuan untuk menemukan agenda tersembunyi kelompok. Tetapi rantai tersebut juga bisa menjadi ekspresi dalam bidang sosial tertentu dari psikodinamis individu para peserta. Tema dramatis mungkin berhubungan dengan masalah

psikologis yang ditekan dari beberapa atau semua anggota dan dengan demikian menarik mereka untuk berpartisipasi. (Bormann, 1972).

Ernest Bormann meminjam gagasan tersebut untuk direplikasi ke dalam tindakan retorik masyarakat dalam skala yang lebih luas dari sekedar proses komunikasi kelompok kecil. Penelitian-penelitian Bormann secara intensif sepanjang tahun 1970-an lantas bermuara pada munculnya Teori Konvergensi Simbolik yang disampaikan dalam tulisannya yang berjudul "*Fantasies and Rhetorical Vision: The Rhetorical Criticism of Social Reality*".

Teori Konvergensi Simbolik didasarkan pada gagasan bahwa para anggota dalam kelompok harus bertukar fantasi dalam rangka untuk membentuk kelompok yang kohesif. Dalam teori ini, sebuah fantasi tidak merujuk pada cerita-cerita fiktif atau keinginan erotis. Fantasi adalah cerita atau lelucon yang mengandung atau mengungkapkan emosi. Fantasi meliputi peristiwa dari seorang anggota kelompok di masa lalu, atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Fantasi tidak mencakup komunikasi yang berfokus pada apa yang terjadi di dalam kelompok.

Bormann (1985) menyebutkan bahwa ada tiga aspek utama yang membentuk Teori Konvergensi Simbolik, yaitu:

1. Penemuan dan penentuan bentuk dan pola komunikasi yang berulang yang mengindikasikan munculnya kesadaran bersama dalam kelompok secara evolutif
2. Deskripsi tentang kecenderungan dinamis dalam sistem komunikasi yang menerangkan mengapa kesadaran kelompok muncul, berlanjut, menurun dan pada akhirnya menghilang
3. Faktor-faktor yang menerangkan mengapa orang-orang terlibat dalam tindakan berbagi fantasi.

Menurut Griffin, E.M. Ledbetter, Andrew. & Sparks (2015), konvergensi hadir melalui simbol dimana individu-individu membangun rasa komunitas atau kesadaran kelompok. Sebagai konvergensi simbolik ikatan kelompok secara kohesif memiliki rasa kebersamaan yang terbentuk. Masing-masing anggota mulai menggunakan kata-kata "kita" untuk menggantikan "aku," dan "kita" bukan "aku." Anggota mungkin bahkan melekat satu sama lain, dan kadang-kadang, berlangsung sesuai kelompok. Meskipun orang "menganggap usaha patungan" melalui konvergensi simbolis, penting untuk menekankan bahwa ada batasan pada seberapa banyak hal yang sesuai dan harus dilakukan.

Bormann (1985) menyatakan bahwa teori ini dibangun dalam kerangka paradigma naratif yang meyakini bahwa manusia merupakan *homo narrans*, yaitu makhluk yang saling bertukar cerita atau narasi untuk menggambarkan pengalaman hidup dan realitas sosialnya (Venus, 2007). *Homo Narrans* berprinsip dasar bahwa manusia merupakan “*social storyteller*” yang berbagi fantasi, membentuk kesadaran kelompok dan menciptakan realitas sosial. Teori ini menjelaskan bahwa solidaritas dan kohesifitas kelompok dapat tercapai melalui kecakapan bersama dan menafsirkan berbagai macam tanda, kode dan teks budaya yang dapat mengarahkan pada terbentuknya realitas bersama (*shared reality*).

Terdapat dua asumsi pokok yang menjadi dasar Teori Konvergensi Simbolik. Pertama adalah realitas diciptakan melalui komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi menciptakan realitas melalui pengaitan antara kata-kata yang digunakan dengan pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh. Asumsi kedua adalah makna individual terhadap simbol dapat mengalami konvergensi (penyatuan), sehingga menjadi realitas bersama. Realitas dalam teori ini dipandang sebagai susunan narasi atau cerita-cerita yang menerangkan bagaimana sesuatu harus dipercayai oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Cerita tersebut bermula diperbincangkan dalam lingkungan kelompok, kemudian

disebarkan ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Menyertai kedua asumsi tersebut, Bormann (1986) juga menyebutkan asumsi epistemologis teori ini, yaitu: (1) Makna, emosi dan motif bertindak ada pada isi pesan yang dinyatakan dengan jelas; (2) Realitas diciptakan secara simbolik; (3) Rantai fantasi menciptakan konvergensi simbolik dalam bentuk dramatik; (4) Analisa tema fantasi adalah metode pokok dalam menangkap realitas simbolik; (5) Tema fantasi dapat terjadi dalam berbagai wacana yang dikembangkan dan terakhir, (6) Terdapat tiga visi analog *master*, yaitu *righteous*, *social* dan *pragmatic*.

Bormann menyebut metode untuk mengoperasionalkan teorinya dengan istilah *Fantasy Theme Analysis* (FTA), sebagaimana konsep “fantasi” menjadi kata kunci dalam teori ini. Untuk memahami teori ini perlu kita pahami istilah-istilah kunci dalam Analisis Tema Fantasi, yaitu :

1. *Fantasy Theme* (Tema Fantasi)

Bormann mendefinisikan tema fantasi sebagai isi pesan yang didramatisasi hingga memicu rantai fantasi (*the content of the dramatizing message that sparks the fantasy chain*). Menurut Miller, (2002), *fantasy theme* (tema fantasi), yang diartikan sebagai dramatisasi pesan, dapat berupa lelucon, analogi, permainan kata, cerita, dan sebagainya, yang memompa semangat berinteraksi.

2. *Fantasy Chain* (rantai fantasi)

Secara harfiah, *fantasy chain* diartikan sebagai rantai fantasi. Maksudnya, ketika pesan yang didramatisasi berhasil mendapat tanggapan dari partisipan komunikasi, hingga meningkatkan intensitas dan kegairahan partisipan dalam berbagi fantasi. Ketika fantasi yang berkembang, maka terjadilah rantai fantasi. Ketika rantai fantasi tercipta, tempo percakapan jadi meningkat, antusiasme partisipan muncul, dan timbul peningkatan rasa empati dan umpan balik di antara partisipan komunikasi.

3. *Fantasy Type* (Tipe Fantasi)

Bormann mengartikan konsep ini sebagai tema-tema fantasi yang berulang dan dibicarakan pada situasi yang lain, dengan karakter yang lain, dan latar yang lain, namun dalam alur cerita yang sama. Jika kerangka narasi (*the narrative frame*) sama, tetapi tokoh, karakter, atau settingnya berbeda, maka tema tersebut dapat dikelompokkan dalam satu jenis fantasi yang sama. Sementara, bila terdapat beberapa tema fantasi, atau kerangka narasi yang berbeda, itu berarti terdapat beberapa tipe fantasi.

4. *Rhetorical Visions* (Visi retorik).

Visi retorik diartikan sebagai “*sharing a fantasy theme and types across under a wider community*”. Di sini tema-tema fantasi itu telah berkembang dan melebar keluar dari kelompok yang mengembangkan fantasi tersebut pada awalnya. Karena perkembangan tersebut, maka tema-tema fantasi itu menjadi fantasi masyarakat luas dan membentuk semacam *rhetorical community* (komunitas retorik).

Teori Konvergensi Simbolik digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa realitas yang diciptakan bersama oleh anggota kelompok dari fantasi-fantasi yang terdapat dalam narasi-narasi percakapan anggota kelompok. Dalam interaksi komunikasi para anggota organisasi, realitas diciptakan melalui pengaitan antara kata-kata yang digunakan dengan pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh. Realitas dalam teori ini dipandang sebagai susunan narasi atau cerita-cerita yang menerangkan bagaimana sesuatu harus dipercayai oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan digunakannya teori ini dalam penelitian ini, diharapkan akan dapat membantu menggambarkan pola komunikasi yang terjadi dalam organisasi masyarakat di Bali dalam rangka penguatan identitas kelompok.

Adapun gambaran penggunaan teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Matriks Kegunaan Teori Dalam Penelitian
Sumber: Diolah Peneliti

Matriks diatas menggambarkan teori identitas sosial, teori interaksi simbolik dan teori konvergensi simbolik berperan dalam penelitian ini. Teori berfungsi sebagai petunjuk dalam menganalisa data lapangan yang dikumpulkan melalui metode etnografi komunikasi. Etnografi Komunikasi sebagai metode penelitian memiliki sejumlah panduan sebagai protokoler penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisa data lapangan. Dengan panduan teori identitas sosial, peneliti dapat menjelaskan anggota-anggota organisasi masyarakat Pemuda Bali Bersatu membangun kesadaran dan identitasnya sebagai anggota dari organisasi yang dinyatakan sebagai *organized crime organization* yang kemudian membentuk pola komunikasi yang berbeda dengan anggota organisasi lain.

Teori Interaksi Simbolik menjelaskan proses pemaknaan simbol-simbol yang digunakan oleh organisasi dan anggotanya. Dalam interaksionisme simbolik, seseorang menyediakan informasi yang dihasilkan dari makna simbol dari sudut pandangnya dan penerima informasi akan memberikan makna dari informasi yang disampaikan. Anggota-anggota ormas ini berkomunikasi dengan komunitas mereka dan terlibat dalam proses saling mempengaruhi tindakan dalam kehidupan sosial. Dalam berinteraksi, mereka mengeluarkan bahasa baru, kebiasaan atau simbol-simbol yang menjadi obyek penelitian.

Selanjutnya Teori Konvergensi Simbolik berfungsi dalam mengenali tema-tema fantasi yang ada pada interaksi komunikasi para anggota komunikasi. Metode Etnografi Komunikasi memungkinkan penemuan tema-tema fantasi tersebut dimana etnografi komunikasi menekankan pada peristiwa komunikasi yang berulang yang dikumpulkan melalui observasi pada perilaku komunikasi anggota-anggota komunikasi. Dalam observasi ditemukan *symbolic cue* atau petunjuk simbolis sebagai penanda adanya tema-tema fantasi pada organisasi tersebut. Tema-tema fantasi tersebut juga ditandai dengan adanya dramatisasi yang berantai pada percakapan anggota-anggota organisasi. Pada saat anggota-anggota organisasi berbagi simbol bersama akan mengakibatkan terjadinya *meeting of mind* dimana mereka bergerak kearah penggunaan sistem simbol yang sama.

Keterkaitan antara Teori Interaksi Simbolik, Teori Konvergensi Simbolik dan Etnografi Komunikasi terletak pada fokus yaitu makna simbolik dan proses konstruksi sosial dalam komunikasi. Teori Interaksi Simbolik memberikan pemahaman tentang makna yang diberikan individu kepada simbol-simbol dalam interaksi sosial sementara Teori Konvergensi Simbolik mempelajari bagaimana simbol-simbol dikonvergensi dan digunakan kelompok untuk membentuk kesamaan persepsi. Etnografi Komunikasi memberikan pendekatan metodologis yang mendalam untuk mempelajari komunikasi dan simbol-simbol dalam konteks sosial secara holistik.

1.4.3 Landasan Konseptual

Terdapat beberapa konsep yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1.4.3.1 Etnografi Komunikasi

Etnografi Komunikasi adalah sebuah kajian mengenai pola-pola komunikasi sebuah komunitas budaya. Secara makro, kajian ini adalah bagian dari etnografi, yang merupakan pengembangan dari Etnografi berbicara (*Ethnography of Speaking*) yang dikemukakan oleh

Dell Hymes pada tahun 1962 (Johnstone & Marcellino, 2010). Pengkajian etnografi komunikasi ditujukan pada peranan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu masyarakat, yaitu mengenai cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya.

Dalam artikel pertamanya, Hymes menjelaskan bahwa etnografi berbicara menyangkut tentang situasi-situasi dan penggunaan pola dan fungsi berbicara sebagai suatu aktivitas tersendiri. Kajian etnografi komunikasi yang dimulai oleh Hymes, sejak saat itu memacu sejumlah studi mengenai pola-pola komunikasi dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia untuk dikembangkan kemudian menjelaskan jenis kerja lapangan yang didukung oleh Hymes, etnografi komunikasi, harus menemukan dan menjelaskan kompetensi yang memungkinkan anggota masyarakat untuk melakukan dan menafsirkan ucapan. Eksplorasi dan dokumentasi kompetensi komunikatif dalam komunitas tutur adalah inti dari etnografi komunikasi. Sebagai sarana untuk tujuan ini, Hymes mendefinisikan unit sosial dan unit analisis untuk etnografi komunikasi dan mengusulkan heuristik etik untuk analisis mereka.

Etnografi komunikasi mengambil bahasa sebagai bahasa kebudayaan dalam situasi sosial yang pertama dan paling penting, sementara juga menyadari perlunya menganalisis kode itu sendiri dan proses kognitif penutur dan pendengarnya (Saville-Troike, 2003). Dalam komunikasi, kepercayaan bersama dan sistem nilai yang terdiri dari budaya dibangun, dimana orang membangun struktur sosial yang membentuk cara hidup komunal sehari-hari mereka. Dengan demikian, setiap kali anggota komunitas berkomunikasi, mereka menampilkan elemen verbal dan nonverbal khusus untuk masyarakat mereka sambil secara bersamaan menciptakan (dan memulihkan) sistem nilai yang menyusun masyarakat itu. Dengan menghadiri, kemudian, pada komunikasi rutin orang, banyak elemen abstrak inti yang mencirikan pandangan dunia atau kehidupan budaya mereka dapat diamati, dipahami, dibandingkan, dikontraskan, dan

diteorikan. *Ethnography of Communications* menawarkan lensa teoretis dan metodologis untuk menerangi budaya tertentu dari kelompok orang tertentu. Dalam penelitian ini etnografi komunikasi menjadi metode dalam pengumpulan data dimana komunikasi anggota-anggota organisasi menjadi fokus penelitian.

Kajian etnografi komunikasi bukanlah kajian linguistik namun merupakan kajian etnografi, serta bukan pula mengenai bahasa, tetapi mengenai komunikasi yang harus melengkapi kerangka berpikir secara mendalam, letak bahasa dalam kebudayaan dan masyarakat yang dinilai (Kalou & Sadler-Smith, 2015). Sementara Lindlof & Taylor, (2002) mengemukakan tentang kefleksibelan etnografi komunikasi dimana telah banyak ahli yang menerapkan konsep etnografi komunikasi ini selain pada pengkajian linguistik, seperti pengkajian terhadap talkshow di televisi, fotografi keluarga dan ritual keanggotaan.

Spradley dalam Kuswarno (2019) menjelaskan fokus perhatian etnografi komunikasi adalah pada apa yang individu dalam suatu masyarakat lakukan (perilaku), kemudian apa yang mereka bicarakan (bahasa), dan terakhir apakah ada hubungan antara perilaku dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat tersebut, sebaik apa yang mereka buat atau mereka pakai sehari-hari (artefak). Pada etnografi komunikasi, yang menjadi fokus perhatian adalah perilaku komunikasi dalam tema kebudayaan tertentu, jadi bukan keseluruhan perilaku seperti dalam etnografi. Adapun yang dimaksud dengan perilaku komunikasi menurut ilmu komunikasi adalah tindakan atau kegiatan seseorang, kelompok, atau khalayak, ketika terlibat dalam proses komunikasi.

Tetapi karena etnografi komunikasi banyak berangkat dari antropologi, maka perilaku komunikasinya pun berbeda dengan perilaku komunikasi dalam ilmu komunikasi. Perilaku komunikasi dalam etnografi komunikasi adalah perilaku dalam konteks sosial kultural. Secara spesifik, etnografi komunikasi dalam penelitian ini membantu menghasilkan hipotesis mengenai berbagai cara, bagaimana fenomena sosiokultural dalam organisasi masyarakat di

Bali, khususnya Organisasi Masyarakat Pemuda Bali Bersatu, membentuk dengan pola-pola komunikasi.

1.4.3.2 Ormas (Organisasi Masyarakat)

Organisasi kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis kemasyarakatan yang tidak bertujuan politis, istilah semula adalah “Organisasi Massa” yang disingkat “Ormas”. Sejak dikeluarkannya Permendagri nomor 33 tahun 2012 istilahnya diganti menjadi “Organisasi Kemasyarakatan” dan disingkat “Orkemas”. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Orkemas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan, dan sosial.

Organisasi kemasyarakatan lahir dari suatu kesadaran, ^[1]_{[5][6]} dan sangat memberdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa, yang di wujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing-masing termasuk didalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan mungkin konsep tandingan atas berbagai kebijakan yang diambil.

Ormas di Indonesia pada umumnya mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial dan masalah hak asasi manusia. Kini, Ormas di Indonesia dapat pula dikatakan sebagai cerminan kesadaran tentang dampak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dan landasan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat guna membentuk organisasi karena kesamaan ide dan cita-cita bukan semata hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja. Artinya, secara keseluruhan mempunyai dampak positif bagi masyarakat atau

minimal dalam menjalankan misi organisasinya dengan menjaga ketertiban umum, jangan sampai menimbulkan konflik atau bersinggungan dengan kepentingan kelompok lain.

Kehadiran organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, dengan berasaskan Pancasila. Dalam perkembangannya organisasi kemasyarakatan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing namun itu merupakan bagian dari dinamika bangsa yang sedang belajar berdemokrasi. Banyak ditemukan kegiatan-kegiatan Ormas yang tidak merepresentasikan fungsi dan tujuannya. Arogansi dan fanatisme berlebihan menjadi rentan gesekan. Seringkali terdapat kasus yang berujung kekerasan, baik dengan masyarakat atau kelompok masyarakat, maupun sesama Ormas sehingga membuat penilaian umum terhadap ormas menjadi negatif.

Konsep Ormas dan LSM menurut ilmuwan (Holloway, 1997) adalah sebuah bentuk organisasi yang memperhatikan kepentingan masyarakat secara mandiri dan bukan untuk mencari keuntungan atau organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Berbeda dari masyarakat sipil, ormas merupakan suatu pergerakan sosial dari lapisan masyarakat yang terorganisir dimana menghadirkan banyak orang yang berbeda dan terkadang berlawanan. Menurut Fowler dalam Lewis (2003) yang mengklarifikasi tentang perbedaan antara Ormas dan Organisasi Non Pemerintah, menyebutkan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil (Ormas) tidak dibentuk untuk menjadi organisasi yang mapan, tidak harus dibutuhkan, tetapi sebagai pilihan masyarakat yang secara sukarela membantu masyarakat, dibentuk oleh individu yang mandiri dan bukan bagian dari pemerintah ataupun dikendalikan oleh suatu badan publik. Organisasi masyarakat sipil ini mematuhi aturan undang-undang, mendaftarkan diri kepada pemerintah dan mengelola sumber daya ormas, tercatat sebagai organisasi untuk pengenalan sosial dan menerima prinsip tanggung jawab sosial. Sedangkan NGOs adalah suatu legitimasi di masyarakat yang lemah/miskin dimana terjadi ketidakadilan yang mereka alami, melakukan

aksi ketika adanya dukungan dan memberikan bantuan dana untuk masyarakat miskin, sebagian besar anggota beroperasi secara parsial (sebagian datang dari pemerintah dan sektor bisnis) dan didasarkan pada nilai-nilai sukarela.

Secara ideal, Ormas atau LSM adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang tentunya memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan (Fakih, 2004). Pembentukan ormas maupun LSM merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Kemunculan Ormas maupun LSM tidak terlepas dari kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan perubahan sosial bagi masyarakat itu sendiri, dimana aspek kesejahteraan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari unsur pemerintah.

Ormas atau LSM merupakan bagian dari masyarakat sipil yang turut menciptakan penegakan hukum yang efektif demi melindungi kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Kelompok-kelompok sipil yang dikelola secara kuat akan mampu melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh orang yang memegang kontrol terhadap administrasi dan sarana-sarana pemaksa. Mereka menghadirkan keadaan plural yang seimbang di antara kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga tidak adanya peluang salah satu pihak untuk mendominasi secara mutlak.

Di Indonesia, setelah Orde Baru tumbang akibat tuntutan demokratisasi, terjadi perubahan paradigma dalam dinamika sosial politik yang berbasis elit menjadi berbasis masyarakat. Pemerintah yang pada umumnya bersifat sentralistik, dengan diberlakukannya UU No 22/1999 dan kemudian UU No. 32/2004, berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik dengan tujuan untuk lebih mengakomodir aspirasi dan mengembangkan daerah sesuai dengan potensi sosial ekonomi dan budaya setempat. Dengan demikian di era demokrasi saat ini, Ormas dan LSM memiliki fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani perubahan

sosial dalam penguatan ranah sipil.

Menurut UU No 17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan fungsi tersebut, Ormas dan LSM bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, Ormas dan LSM merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang independen dan mengutamakan kepentingan publik.

Karakteristik utama masyarakat sipil adalah di ranahnya yang berada antara keluarga dan Negara, menikmati otonomi dari Negara dan digerakkan oleh kesukarelawanan dari para anggota masyarakat (White dalam Potter, 2005). Dalam sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil menjadi unsur yang penting karena menyediakan wahana untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat berhadapan dengan Negara dan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan dasar dan elite-elite politik. Masyarakat sipil berupaya untuk memelihara atau menguatkan nilai-nilai utama dalam kehidupan sosial.

1.5 Pertanyaan penelitian

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peristiwa komunikasi yang terjadi secara berulang (*recurrence events*) pada ormas tersebut?
2. Bagaimana hubungan antar komponen komunikasi yang ada dalam suatu peristiwa komunikasi pada ormas tersebut?
3. Bagaimana simbol-simbol verbal maupun nonverbal yang digunakan serta nilai-nilai yang ditanamkan oleh organisasi kepada anggotanya?
4. Bagaimana pola komunikasi kelompok pada anggota ormas tersebut?

1.6 Metodologi

1.6.1 Paradigma

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif. Paradigma interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Secara umum pendekatan interpretif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi (Neuman, 2018). Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Paradigma ini juga melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretatif. Fakta-fakta tidaklah imparial, objektif dan netral. Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial.

Paradigma interpretif menyatakan situasi sosial mengandung ambiguitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara (Neuman, 2018). Paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku; setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna

yang berbeda; ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Ilmu bersifat idiografis, artinya ilmu mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif.

Paradigma ini digunakan pada penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengamati perilaku komunikasi anggota Ormas dalam penguatan identitas, dimana pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat membangun pola komunikasi yang ada pada ormas tersebut.

1.6.2 Metode/Jenis Studi

Penelitian ini menggunakan studi Etnografi Komunikasi, dimana menurut Kuswarno (2019) dalam bukunya yang berjudul Etnografi Komunikasi, menyatakan bahwa etnografi komunikasi memiliki dua tujuan yang berbeda arah sekaligus. Etnografi komunikasi bisa bersifat spesifik karena mencoba menjelaskan dan memahami perilaku komunikasi dalam kebudayaan tertentu, sehingga sifat penjelasannya terbatas pada suatu konteks tempat dan waktu tertentu. Di satu sisi, etnografi komunikasi juga bisa bersifat global karena mencoba memformulasikan konsep-konsep dan teori untuk kebutuhan pengembangan metateori global komunikasi antar manusia. Pada penelitian ini, etnografi komunikasi membantu peneliti dalam menjelaskan dan memahami perilaku komunikasi ormas Pemuda Bali Bersatu, sebuah organisasi yang terindikasi sebagai *organized crime organization*.

Lebih lanjut Kuswarno (2019) menjelaskan perilaku komunikasi sebagai perilaku yang lahir dari interaksi tiga keterampilan yang dimiliki setiap individu sebagai makhluk social. Ketiga keterampilan itu terdiri dari keterampilan linguistik, keterampilan interaksi dan keterampilan budaya. Dengan demikian etnografi komunikasi merupakan alat atau metode penelitian yang bersifat kualitatif untuk mengasumsikan bahwa perilaku dan makna yang dianut sekelompok manusia hanya dapat dipahami melalui analisis lingkungan alamiah

(*natural setting*) mereka. Etnografi Komunikasi sendiri sebenarnya sebuah metode penelitian komunikasi yang beranjak dari paradigma kualitatif interpretatif.

Sebagai langkah awal untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola komunikasi yang ada dalam suatu masyarakat adalah dengan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi secara berulang. Langkah selanjutnya menginventarisasi komponen yang membangun peristiwa komunikasi, kemudian menemukan hubungan antar komponen tersebut (Hymes dalam Kuswarno, 2019). Hasil akhir dari sebuah penelitian etnografi komunikasi adalah penjelasan pemolaan komunikasi melalui kategori-kategori ujaran. Kategori ujaran adalah pengelompokan peristiwa dan tindak komunikatif ke dalam setting tertentu, atau hubungan antara komponen-komponen komunikasi dalam setting komunikasi tertentu.

Dell Hymes dalam Ibrahim (1994) membuat kategori yang dapat digunakan untuk membandingkan budaya-budaya yang berbeda. Kategori-kategori tersebut adalah:

- (1) *Ways of speaking*. Dalam kategori ini, peneliti dapat melihat pola-pola komunikasi komunitas.
- (2) *Ideal of the fluent speaker*. Dalam kategori ini, peneliti dapat melihat sesuatu yang menunjukkan hal-hal yang pantas dicontoh/dilakukan oleh seorang komunikator.
- (3) *Speech community*. Dalam kategori ini, peneliti dapat melihat komunitas ujaran itu sendiri berikut batas-batasnya.
- (4) *Speech situation*. Dalam kategori ini, peneliti dapat melihat situasi ketika sebuah bentuk ujaran dipandang sesuai dengan komunitasnya.
- (5) *Speech event*. Dalam kategori ini, peneliti dapat melihat peristiwa-peristiwa ujaran yang dipertimbangkan merupakan bentuk komunikasi yang layak bagi para anggota komunitas budaya.
- (6) *Speech act*. Dalam kategori ini, peneliti dapat melihat komponen tindak ujaran.

- (7) *The rules of speaking in the community*. Dalam kategori ini peneliti dapat melihat garis-garis pedoman yang menjadi sarana penilaian perilaku komunikatif.
- (8) *The junction of speech in the community*. Dalam kategori ini, peneliti dapat melihat fungsi komunikasi dalam sebuah komunitas, yang dalam alam kerangka ini menyangkut kepercayaan bahwa sebuah tindakan ujaran dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam komunitas budaya.

Melihat hal tersebut, dapat disimpulkan etnografi komunikasi melihat variabilitas komunikasi. Selain itu, etnografi komunikasi juga memiliki kelebihan untuk mengungkapkan jenis identitas yang digunakan bersama oleh anggota komunitas budaya. Identitas tersebut diciptakan oleh komunikasi dalam sebuah komunitas budaya. Identitas itu sendiri pada hakikatnya merupakan perasaan anggota budaya tentang diri mereka sebagai komunitas. Dengan kata lain, identitas merupakan seperangkat kualitas bersama yang digunakan para anggota budaya dalam mengidentifikasi diri mereka sebagai komunitas. Kelebihan lain dari etnografi komunikasi adalah mampu mengungkapkan makna kinerja publik yang digunakan bersama dalam komunitas serta mengungkap kontradiksi atau paradoks-paradoks yang terdapat dalam sebuah komunitas budaya.

Untuk mengkaji perilaku komunikatif dalam masyarakat tutur, diperlukan pengkajian unit-unit interaksi. Hymes mengemukakan bahwa *nested hierarchy* (hirarki lingkaran) unit-unit yang disebut situasi tutur (*speech situation*), peristiwa tutur (*speech of event*), dan tindak tutur (*speech act*) akan berguna. Dan apa yang dikemukakannya telah diterima secara luas. Dengan kata lain, tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur.

Nested hierarchy yang diungkapkan oleh Hymes tersebut mendasari unit analisis yang akan dilakukan, yaitu mendeskripsikan interaksi yang terjadi dalam praktik-praktik

komunikatif (*communicative practices*), yang terdiri dari situasi komunikatif (*communicative situation*), peristiwa komunikatif (*communicative event*), dan tindak komunikatif (*communication act*) yang dilakukan oleh anggota Ormas Pemuda Bali Bersatu.

Situasi komunikatif merupakan konteks terjadinya komunikasi, situasinya bisa tetap sama walaupun lokasinya berbeda atau bisa berubah dalam lokasi yang sama apabila aktivitas-aktivitas yang berbeda berlangsung di tempat tersebut pada saat yang berbeda. Situasi yang sama bisa mempertahankan konfigurasi umum yang konsisten pada aktivitas dan ekologi yang sama di dalam komunikasi yang terjadi, meskipun terdapat perbedaan dalam jenis interaksi yang terjadi disana. Situasi komunikatif merupakan perluasan dari situasi tutur, namun situasi tutur tidaklah murni komunikatif. Situasi ini bisa terdiri dari peristiwa komunikatif maupun peristiwa yang bukan komunikatif. Situasi bahasa tidak dengan sendirinya terpengaruh oleh kaidah-kaidah berbicara, tetapi bisa diacu dengan menggunakan kaidah-kaidah berbicara itu sebagai konteks.

Peristiwa komunikatif merupakan unit dasar untuk tujuan deskriptif. Sebuah peristiwa tertentu didefinisikan sebagai seluruh perangkat komponen yang utuh. Dell Hymes menyebut kerangka komponen yang dimaksud sebagai *nemonic models*, yang diakronimkan dalam kata *SPEAKING*, yaitu:

- (a) *Setting*, merupakan lokasi (tempat), waktu, musim dan aspek fisik situasi tersebut. *Scene* adalah abstrak dari situasi psikologis, definisi kebudayaan mengenai situasi tersebut;
- (b) *Participants*, merupakan pembicara, pendengar atau yang lainnya, termasuk kategori sosial yang berhubungan dengannya;
- (c) *Ends*, merupakan tujuan mengenai peristiwa secara umum dalam bentuk tujuan interaksi partisipan secara individual. Secara konvensional dikenal juga sebagai fungsi dan diharapkan sebagai hasil akhir dari peristiwa yang terjadi;

- (d) *Act sequence*, disebut juga urutan tindak komunikatif atau tindak tutur, termasuk di dalamnya adalah *message content* (isi pesan) atau referensi denotative level permukaan; apa yang dikomunikasikan;
- (e) *Keys*, mengacu pada cara atau spirit pelaksanaan tindak tutur dan hal tersebut merupakan fokus referensi;
- (f) *Instrumentalities*, merupakan bentuk pesan (*message form*). Termasuk di dalamnya, saluran vokal dan nonvokal, serta hakikat kode yang digunakan.
- (g) *Norms of interaction*, merupakan norma-norma interaksi, termasuk didalamnya pengetahuan umum, pengandaian kebudayaan yang relevan, atau pemahaman yang sama, yang memungkinkan adanya inferensi tertentu yang harus dibuat, apa yang harus dipahami secara harfiah, apa yang perlu diabaikan dan lain-lain;
- (h) *Genre*, secara jelas didefinisikan sebagai tipe peristiwa. Genre mengacu pada kategori-kategori seperti puisi, mitologi, peribahasa, ceramah dan pesan-pesan komersial.

Unit analisis etnogafi komunikasi yang terakhir, yang termasuk ke dalam lingkaran hierarki Dell Hymes adalah tindak komunikatif (*communicative act*). Tindak komunikatif merupakan bagian dari peristiwa komunikatif. Tindak komunikatif pada umumnya bersifat koterminus dengan fungsi interaksi tunggal, seperti pernyataan referensial, permohonan atau perintah dan bisa bersifat verbal atau nonverbal. Dalam konteks komunikatif, bahkan diam pun merupakan tindak komunikatif konvensional (Ibrahim, 1994).

1.6.3 Teknik Penentuan *Key Informant*

Penentuan informan ini dilakukan dengan teknik purposive, dimana *key informant* dipilih dengan pertimbangan bahwa informan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang

diteliti. Dalam penelitian kualitatif yang diutamakan adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyaknya sampel sumber data.

Adapun kriteria dalam penentuan *key informant* dalam penelitian ini adalah:

1. Pimpinan Ormas yang memiliki pengetahuan yang mendetail mengenai anggota organisasinya serta memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan organisasi.
2. Anggota Ormas yang aktif dalam kegiatan ormas dan berinteraksi dengan anggota ormas lainnya.

Selain teknik *purposive sampling* dalam penentuan *key informant*, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah teknik sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya. Teknik ini digunakan untuk menemukan pola-pola komunikasi yang terjadi dalam ormas tersebut.

Dalam penelitian ini, Ketua Harian organisasi digunakan sebagai *key informant* pertama. Hal tersebut didasari oleh struktur organisasi dimana Ketua Harian adalah pimpinan yang menjalankan fungsi organisasi dari hari ke hari. Selain Ketua Harian, *key informant* lainnya adalah anggota organisasi, dimana anggota organisasi ini banyak melakukan interaksi dengan anggota lainnya. Wawancara mendalam dilakukan terhadap kedua *key informant* tersebut untuk mengeksplorasi data-data yang didapat dari hasil observasi. Setelah mendapatkan data yang cukup dari kedua *key informant* tersebut, peneliti juga mewawancarai pimpinan organisasi lainnya seperti Ketua Umum dan juga Dewan Pembina, selain untuk mengeksplorasi data hasil observasi data juga sebagai triangulasi data. Triangulasi ini disebut dengan triangulasi sumber, dimana peneliti menanyakan hal yang sama pada sumber yang berbeda untuk memvalidasi kebenaran data yang diberikan. Informan lainnya adalah Korlap (kordinator lapangan) yang bertugas untuk mengawasi para anggota-anggota di bawah DPC (Dewan Perwakilan Cabang).

Wawancara terhadap Korlap dilakukan untuk menggali data yang belum terekspose oleh Ketua Harian, Ketua Umum dan Dewan Penasehat sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam organisasi. Sementara wawancara terhadap mantan anggota organisasi dilakukan juga sebagai triangulasi data, dimana mantan anggota diharapkan dapat lebih leluasa memberikan data, tanpa ada batasan sebagai anggota organisasi.

1.6.4 *Gaining Access and Rapport*

Dalam rangka menjalin akses dan hubungan (*gaining access and rapport*), unsur diterima (*being accepted*) dapat terwujud karena peneliti sudah mengenal pimpinan ormas tersebut, terkait dengan penelitian peneliti sebelumnya mengenai baliho ormas. Dalam menjalin hubungan dan membangun kedekatan dengan *key informant*, peneliti ikut aktif terlibat dalam beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh ormas ini, seperti persembahyangan bersama dan peringatan hari ulang tahun organisasi. Peneliti juga hadir dalam rapat-rapat organisasi serta memberikan saran dan masukan jika dibutuhkan oleh organisasi.

Gaining access and rapport ini menjadi tantangan tersendiri dalam penelitian ini, mengingat organisasi ini terindikasi sering terlibat dalam tindakan kriminal. Organisasi ini juga sangat jarang melibatkan anggota perempuan. Oleh karena itu peneliti selama pengumpulan data sering menjadi satu-satunya perempuan yang terlibat dalam kegiatan ormas ini, kecuali pada saat rapat.

Peneliti mendapatkan akses dan ijin untuk melakukan penelitian ini berawal dari penelitian bersama Deakin University, Melbourne, yang melakukan penelitian mengenai baliho-baliho ormas yang pada tahun 2015-2017, terpasang di setiap perempatan jalan-jalan induk di kota dan kabupaten seluruh Bali. Pada penelitian tersebut, peneliti mengenal Ketua

Harian Organisasi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar. Ketua Harian yang sering dipanggil oleh De Gadjah ini, pada saat itu juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Denpasar.

Beberapa bulan setelah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tersebut, peneliti pernah diminta untuk menjadi narasumber pada acara pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Partai Gerindra Kota Denpasar. Pada acara tersebut peneliti menyatakan ingin meneliti ormas Pemuda Bali Bersatu kepada De Gadjah. Saat itu De Gadjah menanyakan motif peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Peneliti menjelaskan tertarik meneliti ormas Pemuda Bali Bersatu karena melihat fenomena ormas yang sedang ramai dibicarakan dan menjadi *headlines* surat kabar lokal setelah ormas PBB dinyatakan sebagai *organized crime organization*. Saat itu De Gadjah tidak setuju ormas PBB dinyatakan sebagai *organized crime organization*. "We are not gangster!" Begitu ucapan De Gadjah saat itu. "Silahkan jika ingin melihat ormas PBB lebih dekat". Kemudian peneliti minta ijin untuk bisa melakukan penelitian mengenai Ormas Pemuda Bali Bersatu.

Observasi pertama dilakukan pada saat DPP Ormas Pemuda Bali Bersatu mengadakan rapat pengurus. Peneliti mendapat kabar dari Ketua Harian bahwa ormas Pemuda Bali Bersatu akan mengadakan rapat di sekretariat organisasi di daerah renon, Kota Denpasar. Peneliti mengajak seorang teman perempuan untuk ikut mendampingi peneliti, mengingat mayoritas anggota ormas tersebut laki-laki dengan fisik yang cukup menyeramkan; berbadan besar dan bertato. Dengan mengajak teman perempuan, peneliti berharap tidak ada kecurigaan dari anggota ormas yang melihat kehadiran dua orang asing yang masuk ke dalam rapat mereka serta mampu mereduksi bentrok fisik jika terjadi kesalahpahaman.

Saat rapat berlangsung, Ketua Harian memperkenalkan kami kepada seluruh anggota sebagai peneliti. Beliau mengenalkan kami pada saat awal rapat, dan menjelaskan kehadiran kami kepada seluruh anggota. Dengan demikian peneliti menjadi lebih tenang dan merasa

aman melakukan penelitian. Peneliti menyadari kepercayaan yang telah diberikan oleh Ketua Harian dan seluruh anggota rapat, merupakan sesuatu yang harus dijaga dan sangat penting dalam proses penelitian. Oleh karena itu, peneliti selalu berkomunikasi dengan Ketua Harian, dan seringkali menjadi teman diskusi mengenai perkembangan dunia politik di Bali hingga *personal branding* Ketua Harian sebagai politisi. Penulis beberapa kali pernah membantu dalam menyusun naskah pidato beliau sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Denpasar dan juga membantu membuat materi untuk presentasi saat beliau diundang sebagai narasumber. Kepercayaan dan hubungan baik tersebut terus terjaga hingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang penting dalam penelitian ini.

Meskipun telah mendapatkan akses dan ijin untuk melakukan penelitian, proses pengumpulan data baik wawancara mendalam dan observasi merupakan tantangan tersendiri dalam penelitian ini. Informasi mengenai waktu kegiatan ormas ini tidaklah mudah didapatkan. Peneliti harus sering menanyakan jadwal kegiatan karena seringkali kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara mendadak. Seperti pada saat peneliti mengikuti kegiatan persembahyangan bersama di Pura Segara Rupek, informasi mengenai kegiatan ini baru diberikan sekitar pukul 21.00 WITA dimana keberangkatan rombongan dari Kota Denpasar pukul 07.00 WITA keesokan harinya. Peneliti harus segera menyiapkan peralatan persembahyangan seperti *banten pejati* (sejenis sesajen) bunga, dupa serta atribut persembahyangan seperti kebaya dan kamen (kain sarung). Perbekalan makanan dan minuman juga diperlukan mengingat perjalanan dari Kota Denpasar ke Pura Segara Rupek membutuhkan waktu lebih dari tiga jam. Semua kebutuhan tersebut disiapkan peneliti pada malam itu juga, dan bangun tidur sepagi mungkin untuk bersiap-siap menggunakan kebaya dan sarung yang membutuhkan waktu lebih lama daripada menggunakan busana lainnya.

Tantangan lain adalah ketika peneliti mengikuti acara nongkrong para anggota, dimana tidak ada perempuan yang ikut dalam acara itu. Kegiatan ini juga tidak terjadwal karena

biasanya dilakukan secara spontan. Satu hal yang dikhawatirkan peneliti adalah minuman alkohol yang selalu disiapkan pada saat nongkrong. Peneliti khawatir efek dari mengonsumsi minuman alkohol yang berlebihan akan membuat para anggota tersebut kehilangan kendali diri dan dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang berbahaya. Oleh sebab itu peneliti biasanya hanya mengikuti kegiatan ini satu hingga dua jam, saat mereka sudah terlihat mabuk, maka peneliti segera pergi meninggalkan kegiatan tersebut.

Istilah *organized crime organization* yang ditetapkan pada organisasi ini menjadi peringatan bagi peneliti untuk berhati-hati dalam melakukan penelitian ini. Peneliti harus memastikan waktu yang tepat, sehingga merasa aman untuk mengeksplorasi interaksi anggota-anggota ormas ini. Selain waktu yang menjadi pertimbangan peneliti pada saat pengumpulan data adalah cara berpakaian yang sesuai dengan kegiatan yang diteliti. Ketika kegiatan persembahyangan bersama maka peneliti menggunakan pakaian adat Bali (*kebaya* dan *kamen*) dan untuk kegiatan lain seperti rapat, nongkrong, perayaan hari ulang tahun termasuk dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pakaian dengan gaya maskulin, menggunakan kemeja dan celana panjang, agar perbedaannya tidak terlalu mencolok mengingat minimnya perempuan yang terlibat pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Penggalian informasi mengenai organisasi ini pun tidak mudah. Semua jawaban anggota ormas ini bersifat normatif sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi yang sebenarnya mengenai kegiatan-kegiatan ormas ini. Mereka sangat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan dari peneliti. Oleh karena itu, peneliti mencari mantan anggota organisasi yang sudah menyatakan diri telah keluar dari organisasi sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang tidak dipaparkan oleh informan lain yang masih terdaftar menjadi anggota. Dari mantan anggota tersebut, peneliti dapat mengonfirmasi informasi-informasi rahasia yang didapat dari hasil observasi.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Teknik Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Wawancara mendalam yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara melalui informan kunci (*key informant*) yang memahami situasi dan kondisi organisasi masyarakat yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan bersifat semi terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara namun pada proses pelaksanaan, pertanyaan dikembangkan sesuai alur wawancara.

Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.2 Daftar Key Informant

| No | <i>Key Informant</i> | Jabatan |
|----|----------------------|-----------------|
| 1 | De Gadjah | Ketua Harian |
| 2 | Wi Mangde | Ketua Umum |
| 3 | Ngurah Putra | Dewan Penasehat |
| 4 | A.A Gede Anom | Ketua Korlap |
| 5 | Komang Sudiarta | Anggota |
| 6 | Ngurah Bobby | Angggota |
| 7 | Kadek Putra | Mantan Anggota |

Sumber: Diolah peneliti

2. Observasi

Penggunaan teknik observasi ini digunakan untuk dapat menarik inferensi tentang makna dan pemahaman yang tidak terucap (*tacit understanding*) yang tidak didapatkan pada wawancara ataupun pada dokumentasi. Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, dimana peneliti turun ke lapangan untuk melakukan penelitian dengan melihat keadaan, interaksi dan perilaku komunikasi anggota Ormas Pemuda Bali Bersatu.

Adapun daftar kegiatan ormas yang diobservasi peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Kegiatan Observasi

| No | Nama Kegiatan | Tanggal | Tempat |
|----|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Bakti Sosial | 7 Januari 2021 | Pulau Serangan |
| 2 | Rapat Organisasi | 27 Januari 2021 | Sekretariat DPP Ormas PBB |
| 3 | Nongkrong | 26 Januari 2021 | Posko Ormas PBB |
| 4 | Bakti Sosial Pasar murah | 25 Januari 2022 | Banjar Bhuana Asri, Denpasar |
| 5 | Nongkrong setelah pasar murah | 25 Januari 2022 | Banjar Bhuana Asri, Denpasar |
| 6 | Persembahyangan bersama | 28 Februari 2021 | Pura Luhur Srijong |
| 7 | Rapat Organisasi | 20 Januari 2022 | Sekretariat DPP Ormas PBB |
| 8 | Persembahyangan bersama | 5 Juni 2021 | Pura Segara Rupek |
| 9 | Perayaan Ulang Tahun Organisasi | 5 Juni 2021 | Rumah Ketua DPC Singaraja |

Sumber: diolah peneliti

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan dengan cara mencari artefak atau data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti melihat dokumentasi yang berupa dokumen dan foto yang dimiliki oleh Ormas tersebut termasuk unggahan foto di media sosial pada akun ketua organisasi dan juga akun Instagram dari ormas PBB.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian etnografi komunikasi yang dikemukakan oleh Creswell (2010) adalah sebagai berikut;

1. Tahap deskripsi

Deskripsi menjadi tahap pertama bagi etnografer dalam menuliskan laporan etnografinya. Pada tahap ini peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dengan menggambarkan secara detail objek penelitiannya. Gaya penyampaiannya kronologis dan seperti narrator, diantaranya menjelaskan *a day in life* secara kronologis atau berurutan dari seseorang atau kelompok masyarakat, membangun cerita lengkap dari seseorang atau kelompok masyarakat, membangun cerita lengkap dengan alur cerita dan karakter-karakter yang hidup di dalamnya, atau membuat seperti cerita misteri yang mengundang tanda tanya orang yang membacanya kelak. Dengan membuat deskripsi, etnografer mengemukakan dari masalah yang diteliti, dan tanpa disadari merupakan persiapan awal menjawab pertanyaan penelitian (Kuswarno, 2008).

Dalam penelitian ini tahap deskripsi dipaparkan pada Bab 2, dimulai dengan menjelaskan profil ormas di Bali, sejarah eksistensi ormas di Bali mengingat ormas Pemuda Bali Bersatu merupakan bagian dari perkembangan ormas di Bali. Kemudian dipaparkan pula sejarah dan perkembangan ormas Pemuda Bali Bersatu hingga penetapannya sebagai *organized crime organizations*. Gambaran mengenai ormas Pemuda Bali Bersatu juga termasuk kronologi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan ormas tersebut di bekukan serta kajian beberapa peneliti lain dalam memandang ormas tersebut. Untuk melengkapi gambaran mengenai ormas tersebut, dijelaskan pula mengenai budaya organisasi mencakup iklim organisasi dan bahasa yang digunakan oleh para anggota ormas dalam berinteraksi.

2. Analisis

Pada bagian ini etnografer menemukan beberapa data akurat mengenai objek penelitian, biasanya melalui tabel, grafik, diagram, model yang menggambarkan objek penelitian. Penjelasan pola-pola atau regularitas dari perilaku yang diamati juga termasuk pada tahap ini. Bentuk yang lain dari tahap ini adalah membandingkan objek yang diteliti dengan objek lain, mengevaluasi objek dengan nilai-nilai yang umum berlaku, membangun hubungan antara objek penelitian dengan lingkungan yang lebih besar. Selain itu, pada tahap ini juga etnografer dapat mengemukakan kritik atau kekurangan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan menyarankan desain penelitian yang baru, apabila ada yang akan melanjutkan penelitian atau akan meneliti hal yang sama (Kuswarno, 2008). Analisis pada penelitian ini disajikan pada Bab 3, 4, 5 dan 6 dimana analisis dipaparkan setelah data-data disajikan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian secara langsung.

3. Interpretasi

Interpretasi menjadi tahap akhir pada tahap analisis data dalam penelitian etnografi. Etnografer pada tahap ini mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Tahap interpretasi dalam penelitian ini disajikan pada Bab 7, yang menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis yang disajikan pada bab-bab sebelumnya. Saran ditujukan pada akademisi yang akan melakukan penelitian sejenis, dan juga kepada pemerintah yang berwenang untuk mengawasi aktivitas ormas di Bali khususnya sehingga pengawasan terhadap ormas tersebut dapat menjadi lebih efektif.

1.6.7 Teknik Validitas Data

Teknik validitas data pada penelitian kualitatif pada dasarnya digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah,

juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2013). Pada penelitian ini, teknik validitas data yang digunakan adalah triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 2006). Adapun triangulasi yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Selain dengan triangulasi, peneliti juga melakukan analisis kasus negatif, dimana peneliti akan mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan temuan, yang berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan. Untuk itu peneliti melakukan wawancara terhadap mantan anggota Ormas tersebut, untuk melihat apakah data yang diberikan oleh anggota organisasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penggunaan mantan anggota sebagai narasumber diharapkan dapat memberikan data yang sesuai fakta, berbeda dengan anggota ormas yang kemungkinan merasa takut atau terancam jika memberikan data yang sesungguhnya.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini sebagian besar dilakukan di Kota Denpasar, dimana Kota Denpasar merupakan pusat kegiatan dari Ormas Pemuda Bali Bersatu. Sekretariat Pusat Ormas ini berlokasi di Kota Denpasar, sehingga sebagian besar kegiatan dan interaksi anggota dilakukan disini. Peneliti juga melakukan observasi pada kegiatan ormas yang berlokasi di Kabupaten Singaraja, yaitu di Pura Segara Rupek dan rumah Ketua DPC Singaraja di desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Lokasi lainnya adalah di Pura Luhur Srijong yang terletak di Kabupaten Tabanan, dimana ormas ini menyelenggarakan acara persembahyangan bersama.

1.6.9 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari awal tahun 2021, namun karena terdapat aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) akibat dari adanya pandemic covid-19, maka peneliti baru

bisa melakukan penelitian pada bulan Juni 2021. Kegiatan terakhir yang diikuti oleh peneliti adalah pada bulan Juni 2022.

Selanjutnya peneliti melakukan tahap deskripsi yang diawali dengan melakukan transkrip wawancara, merapikan catatan-catatan hasil observasi dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan. Tahap analisis dan interpretasi dilakukan bersamaan dengan penulisan laporan hasil penelitian yang menjadi draft naskah disertasi. Tahap deskripsi, analisis dan interpretasi dilakukan dari bulan Juni 2022 hingga bulan April 2023